

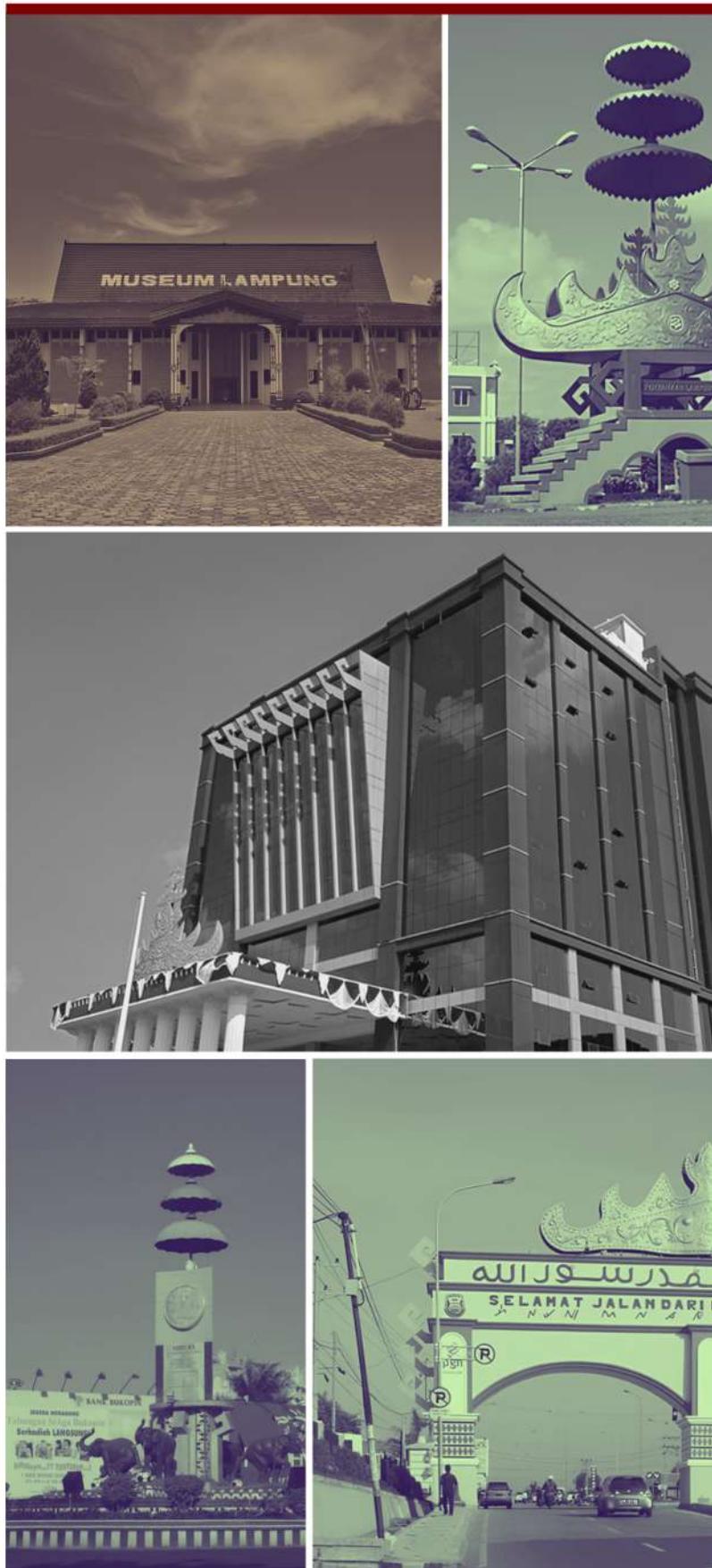


# VOLUNTARY LOCAL REVIEW

KOTA BANDAR LAMPUNG

**KOTA SEHAT,  
CERDAS, AMAN,  
NYAMAN DAN  
BERKELANJUTAN**

2024



# SAMBUTAN

---

# KATA PENGANTAR

---

---

Peran pemerintah daerah, baik di tingkat kota maupun kabupaten, sangat penting dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Sebagian besar target dan indikator dalam TPB/SDGs terkait erat dengan agenda pemerintah daerah. Oleh karena itu, pencapaian SDGs sangat ditentukan oleh kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan layanan kepada masyarakat di berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, dan pengelolaan sampah. Semua layanan ini berkaitan langsung dengan tujuan-tujuan dalam SDGs.

Sebagai pusat populasi dunia di masa depan, kota membutuhkan komitmen tinggi dari Pemerintah Kota untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pemerintah kota di seluruh dunia mulai bersaing untuk menunjukkan kontribusi signifikan mereka dalam agenda pembangunan berkelanjutan global, yaitu TPB/SDGs. Kota Bandar Lampung, ibu kota Provinsi Lampung, juga telah berkomitmen untuk mencapai target dan indikator yang ditetapkan dalam TPB/SDGs. Komitmen ini diwujudkan melalui penyusunan dan penetapan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs/TPB Kota Bandar Lampung 2020-2024. Sebagai kota terbesar di Provinsi Lampung dan gerbang masuk ke Pulau Sumatera, Kota Bandar Lampung diharapkan lebih siap menghadapi tantangan pembangunan dari berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, lingkungan, hukum, dan tata kelola, melalui komitmennya terhadap pencapaian TPB/SDGs.

Untuk mengukur langkah-langkah konkret yang telah atau akan diambil dalam komitmen Kota Bandar Lampung terhadap TPB/SDGs, diperlukan dokumen mutakhir dan efektif dalam mendokumentasikan serta mengkaji progres pembangunan. Oleh karena itu, disusunlah dokumen Voluntary Local Review (VLR) yang merujuk pada data dan indikator yang ditetapkan dalam dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Dokumen VLR Kota Bandar Lampung tahun 2024 ini disusun oleh BAPPEDA Bidang Perekonomian dan SDA Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui tahapan pengumpulan data, pembahasan draf awal, dan finalisasi dokumen akhir. Dokumen VLR ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pembelajaran bagi berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan kota di Bandar Lampung, sekaligus menjadi contoh bagi pemerintah kota/kabupaten lain di Provinsi Lampung khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Tim Penyusun





# BAB 1



# PENDAHULUAN



## LATAR BELAKANG

Sejak berakhirnya *Millennium Development Goals* (MDGs) tahun 2015, PBB menyepakati Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) pada sidang umum PBB September 2015. Kota Bandar Lampung bersepakat dan berkomitmen untuk menjalankan target TPB/SDGs yang ditunjukkan dengan telah disusun dan ditetapkannya dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) 2020-2024 dengan prinsip setara, inklusif, dan tidak ada satu pun yang tertinggal (*no one leave behind*). Kemudian dirumuskan dalam visi dan misi TPB/SDGs Kota Bandar Lampung 2020-2025 yaitu: "Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat" yang dijabarkan dalam 17 goal/tujuan dan 169 target dengan mengedepankan tiga dimensi pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), pemerataan sosial (*social inclusion*), dan perlindungan terhadap lingkungan (*environmental protection*).

Komitmen dalam perencanaan pembangunan Kota Bandar Lampung pun ditunjukkan dengan telah diselaraskannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung 2021-2026 dengan tujuan dan target dalam SDGs. Begitu juga dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung yang merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Kota Bandar Lampung memprioritaskan pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam beberapa poin utama yaitu, pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memulihkan ekonomi Kota Bandar Lampung untuk memenuhi pencapaian SDGs. Prioritas ini menegaskan komitmen Walikota Bandar Lampung terhadap Sdgs Kota Bandar Lampung serta tetap melakukan evaluasi dan menentukan target kinerja untuk tahun-tahun berikutnya.

Begitu juga dengan pendanaan kegiatan, Kota Bandar Lampung melakukan inovasi dan kreativitas untuk mengurangi ketergantungan pendanaan pembangunan terhadap APBD dengan meningkatkan target PAD melalui pengelolaan pendapatan yang efektif dan efisien. Peraturan-peraturan daerah lainnya yang mendukung pencapaian SDGs di Kota Bandar Lampung yaitu sebagai berikut:

- 1 Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.
- 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2040.
- 4 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kesehatan Lingkungan.
- 5 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak.
- 6 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan.
- 7 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- 8 Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 242/IV.01/HK/2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Implementasi Sustainable Development Goals Kota Bandar Lampung Tahun 2021.
- 9 Keputusan Walikota Nomor 698/IV.01/HK Tahun 2020 Tentang Kelompok Kerja Perubahan Iklim (Climate Resilient and Inclusive Cities) Kota Bandar Lampung.
- 10 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung.





## PROFIL KOTA

**Kota Bandar Lampung** merupakan sebuah kota di Indonesia sekaligus ibu kota provinsi Lampung. Kota Bandar Lampung dijuluki sebagai Kota Tapis Berseri. Dimana slogan tersebut memiliki arti yakni kota yang tertib, aman, sejahtera, patuh, rapih, sehat, dan indah. Lampung merupakan gerbang masuk pulau Sumatera, maka dengan itu Bandar Lampung memiliki keuntungan dari segi akses mobilisasi dan pariwisata.



Pusat pemerintahan kota Bandar Lampung terletak di kawasan yang secara historisnya dikenal sebagai Teluk Betung. Kota Bandar Lampung berbatasan dengan beberapa wilayah di antaranya:

- 1** Bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Natar di Kabupaten Lampung Selatan.
- 2** Bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin di Kabupaten Pesawaran dan Kecamatan Katibung di Kabupaten Lampung Selatan.
- 3** Bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan di Kabupaten Pesawaran.
- 4** Bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang di Kabupaten Lampung Selatan.

Secara geografis, Kota Bandar Lampung merupakan gerbang utama Pulau Sumatera, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta memiliki andil penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera dan sebaliknya.

Di masa lampau Kota Bandar Lampung merupakan gabungan antara "kota kembar" yaitu Kota Tanjung Karang dan Kota Teluk Betung, kedua kota tersebut mulanya merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Selatan. Namun setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 kedua kota tersebut terpisah dari Kabupaten Lampung Selatan dan mulai diperkenalkan dengan istilah penyebutan Kota Tanjung Karang-Teluk Betung. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983, Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Teluk Betung berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.

(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3254).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2021-2041, Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan ±18.377 Ha (183,77 km<sup>2</sup>) dengan panjang garis pantai sepanjang 35,6 km dan luas perairan ±11,56 Ha yang terdiri atas Pulau Kubur (0,96 Ha) dan Pulau Pasaran (10,6 Ha). Secara administratif Kota Bandar Lampung terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Peta administratif Kota Bandar Lampung tersaji pada gambar dibawah ini:



Peta Wilayah Kota Bandar Lampung



Kota Bandar Lampung memiliki Pelabuhan Panjang untuk kegiatan ekspor impor dan Pelabuhan Srengsem yang melayani distribusi batubara dari Sumatera ke Jawa, sehingga secara langsung dapat berkontribusi dalam mendukung pergerakan ekonomi nasional. Kota Bandar Lampung berpotensi untuk menjadi Kota Metropolis.

Pada tahun 2015, Kota Bandar Lampung dipetakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) sebagai salah satu kawasan yang berpotensi menjadi area metropolitan, terkhusus dalam cetak biru Wilayah Pengembangan Strategis Merak-Bakauheuni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-api. Keunggulan Kota Metropolis ini adalah menjadi pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa industri, pariwisata serta pendidikan.





# PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

## BANDAR LAMPUNG DALAM ANGKA

Kota Bandar Lampung kota terbesar di Provinsi Lampung. Kota Bandar Lampung pada Tahun 2030 akan mengarah menjadi Kota Metropolitan. Saat ini dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa, sehingga sudah memenuhi salah satu syarat menjadi kota metropolitan. Pada tahun 2021-2024, penduduk Kota Bandar Lampung berjumlah 1.214.330 jiwa. Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan kecamatan pada tahun 2021-2024.

Tabel 1.1 Penduduk per Kecamatan Tahun 2021 - 2024

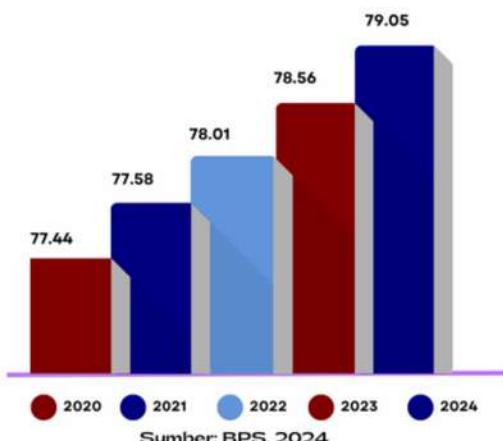
Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa)			
	2021	2022	2023	2024
Teluk Betung Barat	41761	42642	38527	44211
Teluk Betung Timur	54746	55901	49926	55610
Teluk Betung Selatan	43564	44483	39359	45043
Bumi Waras	64189	65542	58169	63853
Panjang	82120	83851	74858	80542
Tanjung Karang Timur	43774	44697	38542	44226
Kedamaian	58843	60084	53457	59141
Teluk Betung Utara	54419	55567	50587	56271
Tanjung Karang Pusat	56831	58029	50326	56010
Enggal	29113	29727	25752	31436
Tanjung Karang Barat	66616	6802	63194	68878
Kemiling	90007	91907	86300	91984
Langkapura	44275	45208	43372	49326
Kedaton	58264	59493	52388	58072
Rajabasa	58522	59756	55958	61642
Tanjung Senang	63175	64507	62402	67244
Labuhan Ratu	53241	54364	48208	53892
Sukarami	68822	70273	67138	72822
Sukabumi	77099	78724	73178	78862
Way Halim	75568	77162	68468	75265
Kota Bandar Lampung	1184949	1209937	1100109	1214330

Sumber : BPS, 2024

Data tersebut menunjukkan dalam beberapa tahun terakhir terjadi kecenderungan penurunan angka kepadatan penduduk yang mendiami wilayah administratif Kota Bandar Lampung. Hal tersebut terjadi sebagai akibat berkurangnya jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung serta perpindahan penduduk baik antar wilayah di dalam Kota Bandar Lampung maupun dari luar Kota Bandar Lampung yang masuk ke Kota Bandar Lampung.

**Indeks Pembangunan Manusia** mendeskripsikan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan lainnya. Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu perkotaan termasuk Kota Bandar Lampung. Trend Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung semakin meningkat pada 2024.

## Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020-2024



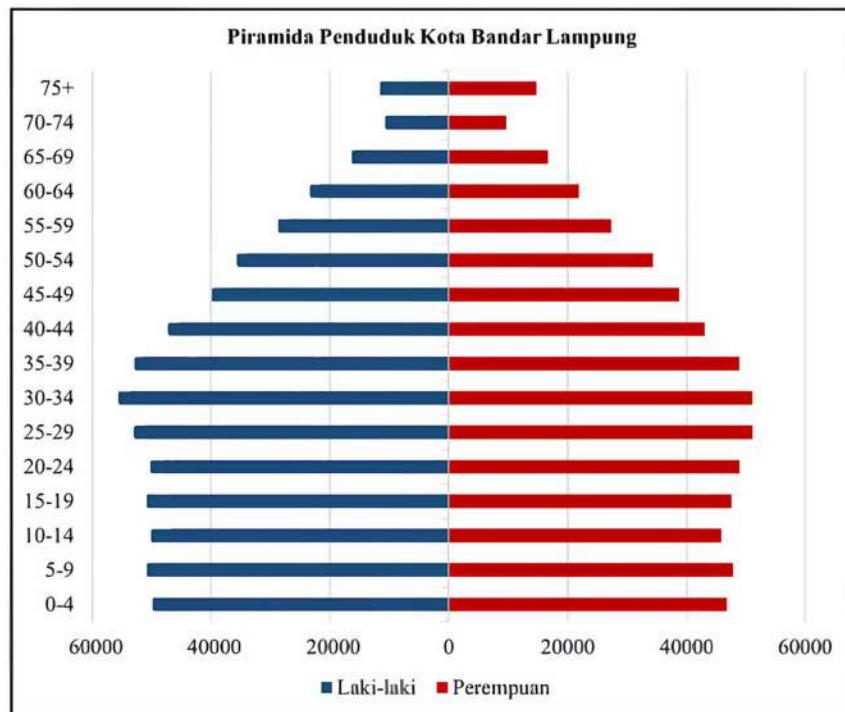
Sumber: BPS, 2024





# PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Piramida Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2022 - 2024



Sumber : BPS, 2024

Seperti terlihat pada grafik, piramida penduduk Lampung tergolong tipe ekspansif, di mana bagian bawah dan tengah lebar, lalu mengerucut di atas. Ini mengindikasikan besarnya penduduk usia muda dibanding yang tua. Angka kelahiran di Kota Bandar Lampung pun, cenderung lebih tinggi dibandingkan kematian. Secara spasial, Lampung Tengah merupakan wilayah dengan penduduk terbanyak di Lampung, yakni 1,52 juta jiwa. Urutan kedua diduduki oleh Bandar Lampung dengan jumlah penduduk mencapai 1,21 juta jiwa.

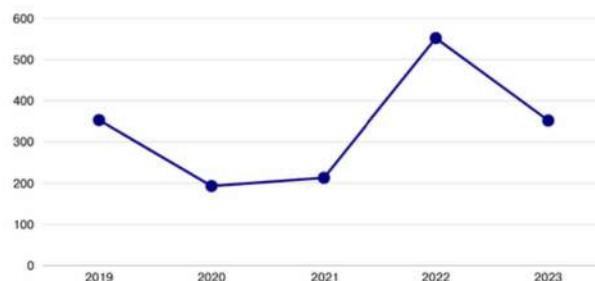
**Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (%)**

PDRB Lapangan Usaha	PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Bandar Lampung (Juta Rupiah)					
	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2256.44	2383.27	2541.71	1486.58	1493.48	1515.20
B. Pertambangan dan Penggalian	2020.72	2156.32	2295.26	1073.83	1090.46	1121.44
C. Industri Pengolahan	13035.41	13565.90	13867.88	8005.00	8056.83	8133.41
D. Pengadaan Listrik dan Gas	71.68	76.59	78.23	63.60	66.93	68.01
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	185.48	194.68	200.84	117.85	122.34	124.08
F. Konstruksi	6961.00	7649.96	8166.39	4574.36	4755.95	4943.58
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8567.47	10102.15	11141.33	5795.90	6281.42	6626.89
H. Transportasi dan Pergudangan	8047.93	10343.05	13252.47	5155.18	6078.43	7026.29
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan	1524.67	1762.22	1987.19	882.32	997.09	1106.40
J. Informasi dan Komunikasi	3879.90	3954.49	4222.56	3291.93	3316.80	3493.72
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3126.45	3256.83	3375.56	1850.29	1804.54	1828.91
L. Real Estate	3606.49	3807.13	3928.01	2425.76	2497.01	2504.66
M,N. Jasa Perusahaan	210.78	251.55	267.62	132.01	148.87	155.15
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3535.94	3590.25	3649.54	2140.42	2111.52	2120.41
P. Jasa Pendidikan	2196.50	2319.01	2398.49	1315.98	1350.26	1378.04
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1294.52	1344.29	1400.93	864.03	862.47	872.69
R,S,T,U. Jasa Lainnya	959.19	1123.98	1329.67	663.11	766.73	868.56
PDRB	61480.56	67881.67	74103.68	39838.17	41801.13	43887.42

Sumber : BPS, 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kota Bandar Lampung dapat dilihat dari distribusi PDRB Kota Bandar Lampung sebagai berikut. Daerah yang memiliki struktur sekunder seperti ini umumnya PDRBnya didominasi sektor perdagangan, hotel, restoran, dan industri pengolahan. Negara atau daerah yang memiliki struktur ekonomi tersier apabila struktur PDRBnya didominasi sektor jasa.

### Laju Inflasi Tahun 2019-2023



Sumber: BPS, 2024

Selama lima tahun terakhir, inflasi mengalami fluktuasi yang signifikan di Kota Bandar Lampung. Tahun 2022 mencatatkan inflasi tertinggi sebesar 5,52%, sedangkan pada Tahun 2020 mencatatkan inflasi terendah sebesar 1,93%. Fluktuasi ini menunjukkan perlunya pengendalian agar daya beli masyarakat tetap stabil, khususnya dengan menjaga stabilitas harga bahan pokok.

Pada Tahun 2023, inflasi di Kota Bandar Lampung mengalami penurunan karena upaya percepatan transisi ekonomi yang dilakukan pemerintah setempat melalui berbagai program pendukung. Inflasi Provinsi Lampung sampai dengan Mei 2024 tercatat mencapai 3,09 persen dari tahun ke tahun, ini berangsur menurun dari realisasi di 2023 lalu yang persentasenya sebesar 3,47 persen tahun per tahun.

Pertumbuhan ekonomi yang signifikan didorong oleh sektor UMKM dan IKM, terutama dari produk olahan pertanian, perikanan, peternakan, dan sektor lainnya. Pendukung dari sektor perbankan juga membantu dalam memfasilitasi permodalan bagi UMKM dan IKM. Korporatisasi berperan penting dalam memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan produktivitas masyarakat, sementara program digital farming di bidang pertanian turut menjaga minat generasi muda untuk terlibat dalam sektor ini.



## **METODOLOGI**

Dokumen VLR SDGs Bandar Lampung Tahun 2024 ini disusun dengan menggunakan metodologi literatur dan metode survey dimana penyusunannya yang terdiri dari pengumpulan data, pembahasan draft awal, dan finalisasi dokumen akhir. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan studi literatur. Pada kegiatan ini dipaparkan mengenai tujuan dan sistematika penyusunan VLR serta kebutuhan data dan informasi yang terkait dengan pencapaian target-target SDGs beserta indikator-indikatornya.

Sebagai hasil dari survey dan studi literatur ini, telah dibuat pemetaan data indikator yang diperlukan dan dinas/instansi yang terkait dengan masing-masing data tersebut. Selanjutnya, perwakilan dari setiap dinas/instansi ditugaskan untuk mengumpulkan data indikator terkait dinas/instansi masing-masing dan menyerahkannya kepada tim penulis dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Data yang terkumpul akan digunakan oleh tim penulis untuk menyusun draft awal dokumen VLR yang kemudian akan dibahas secara internal. Hasil dari pembahasan ini akan menjadi dasar untuk evaluasi dan finalisasi dokumen VLR SDGs Kota Bandar Lampung.



## **Sinergitas SDGs Kota Bandar Lampung dalam Keselarasan dengan RPJMN, RPJMD dan RPJM Kota Bandar Lampung**

### **Prioritas Pembangunan**

Prioritas diberikan pada kegiatan-kegiatan baik dari pusat maupun pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk mencapai SDGs. Hal ini menunjukkan komitmen Wali Kota Bandar Lampung terhadap SDGs Kota Bandar Lampung, dengan tetap mengikuti prosedur evaluasi dan target kinerja. Pembiayaan kegiatan baik dari APBD, APBN, maupun sumber-sumber pembiayaan lainnya menjadi stimulus penting untuk pembangunan berkelanjutan. Revisi Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 menjadi Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 disesuaikan dengan RPJMN 2020-2024. RPJMN 2020-2024 menjadi landasan untuk mencapai visi Indonesia Maju pada tahun 2045.

Penguatan proses transformasi ekonomi adalah fokus utama dalam upaya mencapai tujuan pembangunan tahun 2015, terutama dalam infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat yang lebih baik.



### **LEAVE NO ONE BEHIND**

Sumber daya manusia perlu terus ditingkatkan agar menjadi pekerja yang dinamis, produktif, dan terampil dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan dukungan industri dan talenta global.

Pembangunan infrastruktur menjadi kunci dalam menghubungkan kawasan produksi dan distribusi, yang akan memperkuat ekonomi daerah, mempermudah akses ke kawasan wisata, menciptakan lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah ekonomi rakyat. Tahapan ini menegaskan prioritas pembangunan di Kota Bandar Lampung.





## Sinergitas SDGs Kota Bandar Lampung dalam Keselarasan dengan RPJMN, RPJMD dan RPJM Kota dalam Poin Tujuan ke-1 Tanpa Kemiskinan.



### TUJUAN GLOBAL 1

**Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 1 Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Di Manapun.**

### SASARAN GLOBAL DAN TPB 2024 SESUAI PERPRES 111/2022

Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan sasaran nasional.

- **Menurunnya tingkat kemiskinan** menjadi 6,0-7,0%. Tahun dasar September 2020: 10,19% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).

Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.

- **Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN):** Pada tahun 2024, cakupan kepesertaan JKN meningkat menjadi 98%, dibandingkan dengan 82,07% pada tahun 2020 (Sumber: Dewan Jaminan Sosial Nasional).

- **Cakupan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan:** Pada tahun 2024, cakupan untuk pekerja formal mencapai 74,57% dan pekerja informal 25,94%, meningkat dari 63,82% (formal) dan 3,21% (informal) pada tahun 2020 (Sumber: BPJS Ketenagakerjaan).

Pada tahun 2030, menjamin kesetaraan akses bagi semua laki-laki dan perempuan, terutama masyarakat miskin dan rentan, terhadap sumber daya ekonomi, layanan dasar, kepemilikan tanah dan aset lainnya, warisan, sumber daya alam, teknologi, dan jasa keuangan, termasuk keuangan mikro.

- **Akses Air Minum Layak: Meningkat** menjadi 100% pada 2024, dari 90,21% pada 2020.

- **Akses Sanitasi Layak: Meningkat** menjadi 90% pada 2024, dari 79,53% pada 2020.

Pada tahun 2030, meningkatkan ketahanan masyarakat miskin dan rentan terhadap kejadian ekstrim iklim, guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.

- **Korban dan Dampak Ekonomi Bencana:** Rata-rata korban akibat bencana di daerah rawan bencana ditargetkan maksimal 0,2 per 100.000 jiwa setiap tahunnya, dengan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana sebesar 0,10% (Sumber: RPJMN 2020-2024).

- **Dokumen Kajian Penanggulangan Bencana:** Pada tahun dasar 2019 dan 2020, terdapat 183 dan 246 dokumen kajian terkait kebijakan dan tata ruang bencana, yang ditargetkan menjadi 50 dan 55 dokumen masing-masing pada tahun 2024 (Sumber: BNPB).



Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat rentan terhadap kejadian ekstrim seperti iklim, guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.

#### ● **Korban dan Dampak Ekonomi Bencana:**

Rata-rata korban bencana di daerah rawan maksimal 0,2 per 100.000 jiwa per tahun, dengan potensi kehilangan PDB sebesar 0,10% (Sumber: RPJMN 2020-2024).

#### ● **Dokumen Kajian Penanggulangan Bencana:**

**Bencana:** Penyusunan 50 dokumen kebijakan dan regulasi serta 55 dokumen kajian risiko dan tata ruang di kawasan rawan bencana pada 2024, dibandingkan dengan 183 dokumen (2019) dan 246 dokumen (2020) (Sumber: BNPB).

Menjamin mobilisasi sumber daya yang signifikan dari berbagai sumber, termasuk kerja sama pembangunan, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, guna mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.

#### ● **Pengentasan Kemiskinan:**

Meningkatkan kualitas alokasi pendanaan untuk pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial dan ekonomi produktif, dengan tahun dasar 2019: 15,54 (Sumber: Kementerian Keuangan).

**Efektivitas Pendanaan:** Meningkatkan kualitas alokasi pendanaan untuk pendidikan, keberlanjutan pendanaan dan tata kelola perlindungan sosial, serta pemanfaatan anggaran kesehatan.

#### **RPJMN**

- Pada Maret 2019 Tingkat kemiskinan turun hingga 9,4%, karena program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan secara efektif.
- Pemerintah memprioritaskan stabilitas inflasi, pertumbuhan ekonomi inklusif, lapangan kerja produktif, iklim investasi yang kondusif, regulasi perdagangan yang efisien, peningkatan produktivitas sektor pertanian, dan pengembangan infrastruktur di daerah terpencil.

#### **Kerangka kebijakan mikro dengan strategi:**

- Penyempurnaan kebijakan bantuan sosial
- Peningkatan pendapatan kelompok miskin dan rentan melalui program ekonomi produktif.
- Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

#### **RPJMD**

- Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.
- Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan.
- Mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi.
- Memfasilitasi percepatan terwujudnya Lampung sebagai Pusat Industri Pertahanan Indonesia (bersinergi dengan Kementerian Pertahanan).



## Sinergitas SDGs Kota Bandar Lampung dalam Keselarasan dengan RPJMN, RPJMD dan RPJM Kota dalam Poin Tujuan ke-3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera.

**3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING**



### TUJUAN GLOBAL 3

TPB 3 Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk di semua usia.

### SASARAN GLOBAL DAN TPB 2024

#### SESUAI PERPRES 111/2022

Pada Tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.

● **Menurunnya angka kematian ibu** per 100.000 kelahiran hidup menjadi 183. Tahun dasar 2015: 305 (Sumber data: Survei Penduduk Antar Sensus 2015).

● **Meningkatnya persentase persalinan** di fasilitas pelayanan kesehatan menjadi 95%. Tahun dasar 2020: 87,91% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).

Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kehidupan Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.

● **Menurunnya angka kematian bayi** per 1.000 KH (Kehidupan Hidup) menjadi 16. Tahun dasar 2017: 24 (Sumber data: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017).

● **Menurunnya angka kematian neonatal** per 1.000 KH (Kehidupan Hidup) menjadi 10. Tahun dasar 2017: 15 (Sumber data: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017).

Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.

● **Menurunnya insidensi HIV** (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV) menjadi 0,18. Tahun dasar 2020: 0,18 (Sumber data: Kementerian Kesehatan).

● **Menurunnya insidensi Tuberkulosis (TB)** per 100.000 penduduk menjadi 190. Tahun dasar 2019: 312 (Sumber data: *Global Tuberculosis Report 2020*).

● **Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria** menjadi 405. Tahun dasar 2020: 312 (Sumber data: Kementerian Kesehatan).

● **Menurunnya insidensi Hepatitis B** menjadi 1,09%. Tahun dasar 2019: - (Sumber data: Kementerian Kesehatan).

● **Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta** menjadi sebanyak 514. Tahun dasar 2020: 401 (Sumber data: Kementerian Kesehatan).

● **Meningkatnya jumlah kabupaten/kota endemis filariasis** yang mencapai eliminasi menjadi 190. Tahun dasar 2020: 64 (Sumber data: Kementerian Kesehatan).

Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.

- **Menurunnya persentase merokok** pada penduduk usia 10-18 tahun menjadi 8,7%.

Tahun dasar 2018: 9,1% (Sumber data: Riset Kesehatan Dasar 2018).

- **Tidak meningkatnya prevalensi tekanan darah tinggi**, dengan target sebesar 34,1%, Tahun dasar 2018: 34,1% (Sumber data: Riset Kesehatan Dasar 2018).

- **Tidak meningkatnya prevalensi obesitas** pada penduduk usia >18 tahun, dengan target sebesar 21,8%. Tahun dasar 2018: 21,8% (Sumber data: Riset Kesehatan Dasar 2018).

Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.

- **Meningkatnya jumlah penyalahgunaan napza** yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis menjadi 11.500. Tahun dasar 2020: 9.583 orang (Sumber data: Kementerian Kesehatan).

Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.

Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.

- **Menurunnya Angka Kelahiran Remaja** (*Age Specific Fertility Rate/ASFR*) umur 15-19 tahun menjadi 18. Tahun dasar 2017: 36 (Sumber data: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017).

Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.

- **Meningkatnya cakupan Penerima Bantuan Iuran** (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40 Persen penduduk berpendapatan terbawah menjadi 112,9 juta penduduk. Tahun dasar 2020: 96,6 juta (Sumber data: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan).

Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.

- **Menurunnya persentase merokok** pada penduduk usia 10-18 tahun menjadi 8,7%. Tahun dasar 2018: 9,1% (Sumber data: Riset Kesehatan Dasar 2018).

Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.



Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai *the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health* yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.

● **Meningkatnya persentase imunisasi** dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan menjadi 90%. Tahun dasar 2020: 70% (Sumber data: Kementerian Kesehatan).

● **Meningkatnya persentase puskesmas** dengan ketersediaan obat esensial menjadi 96%. Tahun dasar 2020: 92,12% (Sumber data: Kementerian Kesehatan).

Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.

● **Meningkatnya Persentase puskesmas** dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar menjadi 83% Tahun dasar 2020: 39,9% (Sumber data: Kementerian Kesehatan).

Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.

### **RPJMN**

Konvergensi Stunting dilakukan oleh seluruh stakeholder agar dapat mencapai target Prevalensi Stunting Nasional 14% di tahun 2024.

Strategi Nasional Stunting juga menetapkan tiga prioritas, yaitu:

- sasaran prioritas;
- intervensi prioritas; dan
- lokasi prioritas.

### **RPJMD**

Lampung Sehat: Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS), perbaikan kualitas layanan kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit (bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota).

### **RPJM KOTA BANDAR LAMPUNG**

Pada Tahun 2023, mengurangi rasio angka kematian ibu melahirkan pada saat persalinan yaitu menjadi 5 kasus, dibandingkan Tahun 2021 yaitu sebanyak 15 kasus angka kematian ibu melahirkan pada saat persalinan.

Pada Tahun 2023, mengurangi rasio angka kasus DBD yaitu menjadi 202 kasus, dibandingkan Tahun 2022 yaitu sebanyak 1440 kasus angka kasus DBD.

Sasaran prioritas dari pencegahan stunting adalah ibu hamil, ibu menyusui dan anak 0-2 tahun atau rumah tangga 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).



## **Sinergitas SDGs Kota Bandar Lampung dalam Keselarasan dengan RPJMN, RPJMD dan RPJM Kota dalam Poin Tujuan ke-4 Pendidikan Berkualitas dan Bermutu**



### **TUJUAN GLOBAL 4**

**TPB 4 Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.**

### **SASARAN GLOBAL DAN TPB 2024**

#### **SESUAI PERPRES 111/2022**

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

● **Meningkatnya proporsi anak diatas standar kompetensi minimum** dalam tes PISA menjadi 34,1% untuk membaca dan 30,9% untuk MTK. Tahun dasar 2019: 30,1% untuk membaca dan 28,1% untuk MTK (Sumber data: Programme for International Student Assessment/PISA).

● **Meningkatkan tingkat penyelesaian pendidikan** untuk SD/sederajat menjadi sebesar 98,94%, SMP/sederajat menjadi sebesar 93,33%, dan SMA/sederajat menjadi sebesar 71,71%. Tahun dasar 2020: SD/sederajat 96,00%, SMP/sederajat 87,89%, dan SMA/sederajat 63,95% (Sumber data: Survei sosial ekonomi sosial).

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.

● **Meningkatnya persentase anak kelas I SD/MI/SDLB** yang pemah mengikuti pendidikan anak usia dini menjadi 72,77%. Tahun dasar 2020: 62,48% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).

Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan Pendidikan tinggi, termasuk universitas, Yang terjangkau dan berkualitas.

● **Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK)** Perguruan Tinggi (PT) meningkat 32,28%. Tahun dasar 2020: 30,85% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional)

Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.

● **Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)** dalam pembelajaran.



Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.

#### ● **Meningkatnya rasio Angka Partisipasi**

**Kasar (APK)** untuk 20% termiskin dan 20% terkaya untuk tingkat SMA/SMK/MA/Sederajat menjadi sebesar 0,83 dan tingkat Pendidikan Tinggi menjadi sebesar 0,32. Tahun dasar 2020: SMA/Sederajat sebesar 0,77; dan Pendidikan Tinggi sebesar 0,28 (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

#### ● **Meningkatnya kualitas pengajaran dan pembelajaran,** melalui penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran berfokus pada kemampuan literasi/keaksaraan di semua jenjang.

Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.

#### ● **Mendorong pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun** salah satunya melalui program penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.

#### **RPJMN**

Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, trampil, dan berkarakter.

Pembangunan SDM dengan cara:

- Peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas
- Pendidikan dan pelatihan vokasi
- Pendidikan tinggi
- Iptek dan inovasi
- Pembangunan karakter
- Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila
- Pemajuan dan pelestarian kebudayaan

#### **RPJMD**

Smart School pemanfaatan IT untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama dan menjadikan rumah ibadah dan pondok pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan publik untuk menangkal radikalisme serta mengembangkan sikap kebangsaan.

Memberikan insentif khusus kepada Guru Honorer,

#### **RPJM KOTA BANDAR LAMPUNG**

- Pemerintah Kota Bandar Lampung berkomitmen dan mendukung penuh program sekolah penggerak dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya profil Pancasila dan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan.
- Program GTK Kemendikbud.
- E-layanan PAUD, DIKDAS, dan DIKMEN.
- Program profesi guru dalam jabatan.
- Program raport guru.





## Sinergitas SDGs Kota Bandar Lampung dalam Keselarasan dengan RPJMN, RPJMD dan RPJM Kota dalam Poin Tujuan ke-5 Kesetaraan Gender

**5**GENDER  
EQUALITY

### TUJUAN GLOBAL 5

TPB 5 Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan

Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun.

- **Menguatnya kebijakan dan regulasi** peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang Publik dan pribadi, termasuk Perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.

- **Meningkatnya perlindungan perempuan** termasuk pekerja migran dari kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

- **Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan** usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir. Tahun dasar 2016 : 9,4% (Sumber data : Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2016).

Menghilangkan semua praktik berbahaya, seperti pernikahan dini dan paksa, serta sunat perempuan.

- Menurunnya persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun menjadi 8,74% Tahun dasar 2020: 10,35% (Sumber data : Survei Sosial Ekonomi Nasional).

### SASARAN GLOBAL DAN TPB 2024 SESUAI PERPRES 111/2022

Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.

- **Meningkatnya keterwakilan perempuan** di DPR RI menjadi 22,52%, DPRD Provinsi menjadi 20%, dan DPRD Kabupaten/Kota menjadi 17%. Tahun dasar Hasil Pemilu 2019 untuk DPR RI: 20,52%, DPRD Provinsi: 17,53%, dan DPRD Kabupaten/Kota: 15,72% (Sumber data: Komisi Pemilihan Umum).

- **Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender** (IDG). Tahun dasar 2020: 75,57% (Sumber data: Badan Pusat Statistik).

Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.

- **Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana** dan kesehatan reproduksi.

Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.

- Menguatnya kebijakan dan regulasi peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.

- Meningkatnya proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam menjadi 75,7%. Tahun dasar 2020: 57,48% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).

Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.

- Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di kementerian/lembaga, Pemerintah

Daerah, dan Pemerintah desa.

### RPJMN

Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

- Penguatan kebijakan regulasi
- Percepatan pelaksanaan PUG di kementerian /lembaga pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa.
- Peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki.
- Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan.
- Peningkatan jejaring dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat.

### RPJMD

**Perempuan Berjaya:** memandirikan perempuan secara ekonomi, pengarusutamaan gender.

**Lampung Ramah Perempuan dan Anak:** mengembangkan fasilitas dan ruang publik ramah perempuan dan anak.

**Anak Muda Berjaya:** mendorong kompetensi dan festival seni/olahraga, gerakan malu menganggur, mencetak wirausaha muda, pendirian gelanggang remaja.

### RPJM KOTA BANDAR LAMPUNG

- RPJM Kota Bandar Lampung
- Program pengelolaan sistem data gender dan anak
- Program forum anak
- Aplikasi pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) "SAI BETIK"
- Aplikasi puskesmas ramah anak (PUSRA)
- Sekolah ramah anak (SRA)
- Program pengelolaan pendidikan (SPM)



## Sinergitas SDGs Kota Bandar Lampung dalam Keselarasan dengan RPJMN, RPJMD dan RPJM Kota dalam Poin Tujuan ke-6 Air Bersih dan Sanitasi

### Layak

#### 6 CLEAN WATER AND SANITATION



#### TUJUAN GLOBAL 6

TPB 6 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

#### SASARAN GLOBAL DAN TPB 2024 SESUAI PERPRES 111/2022

Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.

● **Percentase rumah tangga dengan akses air minum layak mencapai 100%**, dengan 30,45% di antaranya memiliki akses perpipaan dan 15% memiliki akses air minum aman. Pada tahun dasar 2020, persentase akses air minum layak adalah 90,21%, dengan 20,69% dari rumah tangga memiliki akses perpipaan dan 11,9% memiliki akses air minum aman. (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan riset Statistik dan Survei Kualitas Air Minum, Kementerian Kesehatan)

Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan Praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.

● Percentase rumah tangga yang menempati hunian dengan **akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman sebesar 90%** untuk layak, termasuk 15% untuk aman. Tahun dasar 2020: 79,53% untuk layak termasuk 7,64% untuk aman (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).

● Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan **Buangan Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka sebesar 0%. Tahun dasar 2020:** 6,19% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional)

● **Jumlah rumah tangga yang terlayani Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja/IPLT (RT) sebesar 8,6 juta** rumah tangga pada periode tahun 2020-2024. Tahun dasar 2019: ± 900 ribu rumah tangga (Sumber data: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).

Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.

Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.

Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerja sama lintas batas yang tepat.

Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.

### **RPJMN**

- Tata kelola dan kelembagaan penyelenggaraan air minum
- Meningkatkan komitmen melalui pengintegrasian target dan sasaran penyediaan air minum nasional
- Prioritas perluasan cakupan layanan melalui pemanfaatan kapasitas yang telah terbangun
- Peningkatan dan pembangunan SPAM serta pengelolaan aset
- Peningkatan minat Investasi dan kerjasama badan usaha
- Peningkatan akses layanan sanitasi layak dan aman
- Implementasi kebijakan penyediaan layanan dasar pemukiman yang optimal
- Pengembangan sektor sanitasi yang ideal

### **RPJMD**

- Air Limbah Domestik 90% Rumah Tangga memiliki akses sanitasi layak (termasuk 10% Akses Aman)
- Praktik BABS di Tempat Terbuka 0% RT
- Program perencanaan Lingkungan Hidup
- Program pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup
- Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)

- Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
- Program Pengelolaan sumber daya air (SDA)

### **RPJM KOTA BANDAR LAMPUNG**

- Target capaian 100% , dan 15% akses aman.
- Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum layak di kota Bandar Lampung mencapai 98,06.
- Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman ,termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun capaian 35,61% dari target capaian 90% akses layak (termasuk 15% akses aman) 47.237
- Kota Bandar Lampung hingga tahun 2024 ditargetkan akan menyuplai air minum sebanyak 750 liter per detik untuk 60.000 SR atau sekitar 300.000 jiwa di delapan kecamatan, yaitu Kecamatan Rajabasa (7.212 SR), Way Halim (8.838 SR), Tanjung Senang (5.990 SR), Sukabumi (9.337 SR), Labuhan Ratu (7.553 SR), Kedaton (6.591 SR), Sukarame (8.092 SR), dan Kedamaian (6.388 SR).
- Jumlah Penduduk Terlayani 373.376 Jiwa
- Jumlah kecamatan yang terlayani air bersih sejumlah 18 Kecamatan dengan jumlah sambungan rumah (SR) yang telah terpasang sekitar 60.006 lebih hingga saat ini.
- Air limbah domestik sebesar 95% rumah tangga memiliki akses sanitasi layak termasuk 12% akses aman.





## Sinergitas SDGs Kota Bandar Lampung dalam Keselarasan dengan RPJMN, RPJMD dan RPJM Kota dalam Poin Tujuan ke-8 Pekerjaan dan Perumbuhan Ekonomi

### 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH



#### TUJUAN GLOBAL 8

TPB 8 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

#### SASARAN GLOBAL DAN TPB 2024

#### SESUAI PERPRES 111/2022

Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya, setidaknya 7% pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.

- **Meningkatnya Gross National Income (GNI) per kapita (Atlas Method)** diharapkan menjadi USD5.810-6.000 per kapita. Tahun dasar, 2020: USD3.870 (Sumber data: World Bank).

Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.

- **Pertumbuhan PDB riil per orang** yang bekerja meningkat menjadi 3,7-4,5%. Tahun dasar 2020: -1,84 (Sumber data: Badan Pusat Statistik).

Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi pemuda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.

- **Meningkatnya kualitas pemuda.**

Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.

- **Akses layanan keuangan formal** usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 30,8%. Tahun dasar 2020: 24,39% (sumber data: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Otoritas Jasa Keuangan).

Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negara-negara maju sebagai pengarah.

- **Tersusunnya dokumen strategi pelaksanaan** pencapaian sasaran pola konsumsi dan produksi berkelanjutan sebanyak 10 dokumen. Tahun dasar 2020: 2 dokumen (Sumber data: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).



Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.

Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja.

### **RPJMN**

- Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)
- Peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
- Peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan
- Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan
- Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
- Peningkatan nilai tambah lapangan kerja, dan investasi di sektor rill, dan industrialisasi
- Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
- Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

### **RPJMD**

- Program pengembangan destinasi pariwisata
- Program pengembangan ekonomi kreatif berbasis kebudayaan lokal
- Program Peningkatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan
- Program Peningkatan Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri
- Program Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Program Koordinasi Peningkatan Perekonomian Daerah
- Program Peningkatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)

### **RPJM KOTA BANDAR LAMPUNG**

- Membuat regulasi dan kebijakan serta menjaga sinergi antara pemerintah daerah dengan pengusaha; pengembangan sektor-sektor ekonomi seperti Jasa, konstruksi, Pariwisata, industri dan UMKM.
- Meningkatkan penyerapan tenaga kerja, penyerapan sumberdaya daerah serta meningkatkan ekspor produk dan jasa yang dihasilkan; hingga pemberian bantuan bagi masyarakat dalam bentuk pelatihan, pembuatan sarana penunjang maupun pemberian bantuan finansial.



**Sinergitas SDGs Kota Bandar Lampung dalam Keselarasan dengan RPJMN,  
RPJMD dan RPJM Kota dalam Poin Tujuan ke-11 Kota Aman dan  
Permukiman Yang Berkelaanjutan**



**TUJUAN GLOBAL 11**

**TPB 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelaanjutan**

**SASARAN GLOBAL DAN TPB 2024**

**SESUAI PERPRES 111/2022**

Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.

- Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau sebesar 70%. Tahun dasar 2019: 56,51% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).

Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas dan orang tua.

- Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota) sebanyak 6 kota. Tahun dasar 2019: 1 kota (Sumber data: RPJMN 2020-2024).

Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.

- Indeks Pembangunan Kebudayaan mer:capai 62,7. Tahun dasar 2019: 55,23 (Sumber data: Rencana Kerja Pemerintah 2021).

Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang berhubungan dengan air, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan .

Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.

Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan / mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana.

## **RPJMN**

- Urban mobility plan untuk kota besar dan sedang melalui program pengembangan kapasitas pemda
- Pengembangan angkutan massal perkotaan berbasis rel yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan; dan (6) Pengembangan Transit Oriented Development (TOD).
- Penyediaan infrastruktur jalan yang terintegrasi dengan aspek tata guna lahan, melalui pembangunan jaringan jalan mendukung pusat kegiatan ekonomi dan kawasan perumahan; pembangunan jalan lingkar kota untuk jalur logistik; serta peningkatan kapasitas jalan dan penataan sistem drainase jalan perkotaan.
- Pengembangan pembangkit berbasis EBT, melalui pengembangan dan pemanfaatan PLTSa untuk pengolahan sampah yang ramah lingkungan dan menghasilkan produk samping listrik, dan pengembangan waste to energy.
- Penggelaran infrastruktur fixed broadband untuk perkotaan (kawasan perumahan, pusat ekonomi, pusat pendidikan), melalui
- pemberian kemudahan perizinan penggelaran infrastruktur fixed broadband;
- meningkatkan kapasitas industri lokal pendukung fixed broadband;

Penggelaran infrastruktur fixed broadband untuk perkotaan (kawasan perumahan, pusat ekonomi, pusat pendidikan), melalui

- pemberian kemudahan perizinan penggelaran infrastruktur fixed broadband;
- meningkatkan kapasitas industri lokal pendukung fixed broadband;

## **RPJMD**

- Program pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan diselaraskan dengan pengembangan jalan dan jembatan nasional dan Kab/Kota dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah.
- Program pengembangan kualitas transportasi antar moda.
- Program pengembangan sistem penyediaan air minum regional (SPAM Regional).
- Program pengembangan sistem pengolahan sampah regional.
- Program peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman layak huni yang sehat, nyaman, dan terjangkau.

## **RPJM KOTA BANDAR LAMPUNG**

- Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan. Dibuktikan dengan meningkatnya rasio sampah yang terangkut ke TPA pada Tahun 2023 sebesar 845 Ton. Naik 35 Ton dari tahun 2022.
- Normalisasi sungai sebagai upaya pencegahan banjir.
- Peningkatan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan





**Sinergitas SDGs Kota Bandar Lampung dalam Keselarasan dengan RPJMN,  
RPJMD dan RPJM Kota dalam Poin Tujuan ke-13 Perubahan Iklim**

**13 CLIMATE ACTION**



**TUJUAN GLOBAL 13**

**TPB 13 Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya**

Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.

- Rata-rata korban akibat bencana hidrometeorologi di daerah rawan bencana maksimal sebesar 0,2 per 100.000 jiwa setiap tahunnya (Sumber Data: RPJMN 2020-2024).
- Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030.
- Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (persen PDB) sebesar 1,15% (Sumber data: RPJMN 2020-2024).

Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.

- Persentase penurunan emisi GRK sebesar 26,35%. Tahun dasar 2019: 22,60% (Sumber data: Rencana Kerja Pemerintah 2021).
- Persentase penurunan intensitas emisi GRK sebesar 29,915. Tahun dasar 2019: 22,80% (Sumber data: Rencana Kerja Pemerintah 2021).

Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini.

**SASARAN GLOBAL DAN TPB 2024  
SESUAI PERPPRES 111/2022**

- Meningkatnya jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup sebanyak 1.080 unit (Sumber data: RPJMN 2020-2024).

**RPJMN**

- Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim
- Pembangunan lingkungan hidup serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui :
  - Peningkatan kualitas lingkungan hidup
  - Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim
  - Pembangunan rendah karbon



**RPJMD**

- Program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
- Program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
- Program penanggulangan bencana (SPM)
- Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
- Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
- Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran (SPM)

**RPJM KOTA BANDAR LAMPUNG**

- Strategi ketahanan sektor air bersih
- Peningkatan cakupan pelayanan air bersih
- Penghematan air dan pemanfaatan kembali
- Strategi ketahanan sektor lingkungan hidup
- Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
- Pembuatan sumur resapan dan biopori
- Pengelolaan limbah rumah tangga, pasar, dan industri secara terpadu
- Strategi ketahanan sektor infrastruktur
- Pembangunan talud di sekitar wilayah rawan longsor
- Pembangunan dan pemeliharaan drainase terpadu
- Pengelolaan sampah secara terpadu
- Penataan pemukiman yang tahan terhadap perubahan iklim dan bencana
- Strategi ketahanan sektor kelautan pesisir dan perikanan
- Pembangunan tanggul pemecah ombak
- Pengendalian intrusi air laut
- Penyaringan air payau
- Penyelamatan biota laut





## BAB 2



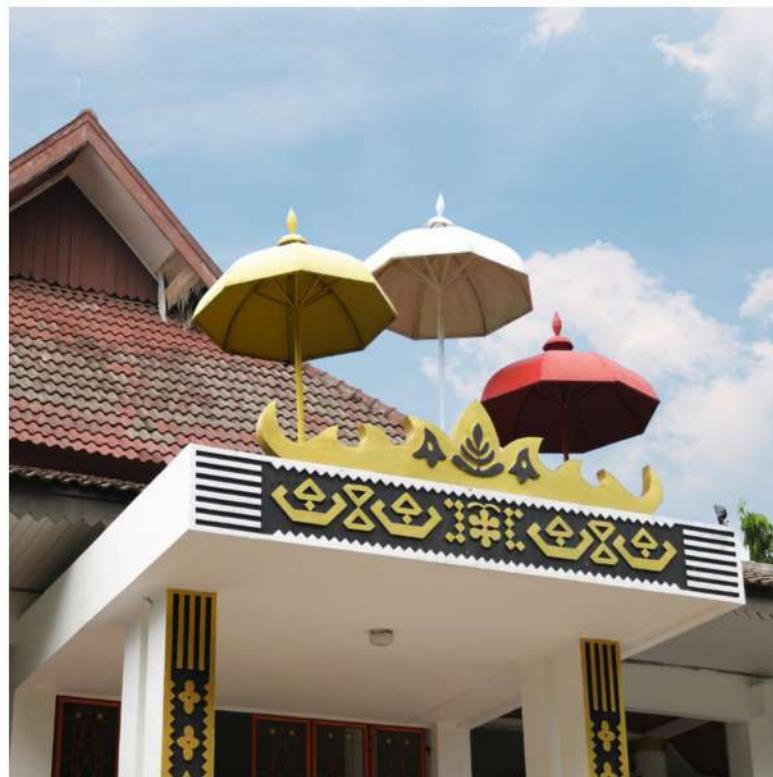
# KOTA BANDAR LAMPUNG DAN KOMITMEN TERHADAP SDG'S

## Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Bandar Lampung

Melalui Perpres 111/2022, presiden menetapkan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) nasional untuk tahun 2024, yang dirancang dengan mengacu pada tujuan global TPB 2030 dan sasaran nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Pemerintah Kota Bandar Lampung menindaklanjuti peraturan ini dengan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs melalui berbagai kegiatan, termasuk Focus Group Discussion (FGD) yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi, persepsi, serta melakukan advokasi bersama akademisi dan sektor terkait. Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pencapaian TPB/SDGs melalui kegiatan workshop.

Tujuan monitoring adalah mengamati perkembangan pencapaian TPB/SDGs dari waktu ke waktu untuk mengukur kemajuan target menggunakan indikator yang ditetapkan, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi masalah yang muncul untuk tindakan dini. Sementara itu, tujuan evaluasi adalah memberikan gambaran atas capaian TPB/SDGs dan menganalisis permasalahan serta faktor penyebabnya, sehingga hasil evaluasi dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang terkait dengan TPB/SDGs.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs mencakup 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan dalam target dan indikator yang selaras dengan RPJMN dan RPJMD.



Target dan indikator yang dipantau dan dievaluasi tercantum dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan. Pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs dilakukan pada program, kegiatan, dan keluaran (output) yang tercantum dalam RAN dan RAD, yang dibiayai dari APBN, APBD, maupun sumber non-pemerintah. Implementasi program dan kegiatan dalam RAD TPB/SDGs Kota Bandar Lampung dapat diketahui dari beberapa komitmen dan kondisi terkini yang menjadi tantangan, sehingga menjadi dasar dalam penyusunan dokumen VLR ini dan perencanaan selanjutnya.



Percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Kota Bandar Lampung mengacu pada target dan sasaran nasional serta global untuk Tahun 2030. Sasaran nasional untuk Tahun 2024 disusun berdasarkan tujuan global TPB/SDGs 2030 dan sasaran nasional dalam RPJMN 2020-2024, sesuai dengan Perpres 111/2022. Tujuan tersebut adalah untuk:

- Menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan
- Menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat
- Menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif
- Terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pasal 8 mengatur bahwa pemerintah membentuk tim koordinasi nasional yang terdiri dari Dewan Pengarah Nasional, Tim Pelaksana Nasional, Kelompok Kerja Nasional, dan Tim Pakar untuk mencapai sasaran TPB Nasional Tahun 2024. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga membentuk tim dari fungsional perencana pada perangkat daerah untuk mensinergikan program dan kegiatan teknis dengan program keberlanjutan. Dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, diharapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional, Daerah, dan Kota Bandar Lampung dapat tercapai lebih cepat dan terarah sesuai dengan dokumen Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.

Berdasarkan dekade aksi (Decade of Action), pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah memasuki 10 tahun, sehingga diperlukan upaya percepatan pencapaian target oleh seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pendanaan inovatif mencakup sumber-sumber dan skema pendanaan dari pemangku kepentingan non-pemerintah di tingkat global, nasional, maupun daerah untuk mempercepat pencapaian TPB. Dalam hal pendanaan TPB, sumber-sumber pendanaan dapat berasal dari:

- Anggaran pendapatan belanja negara;
- Anggaran pendapatan belanja daerah dan atau;
- Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





## **Komitmen Kota Bandar Lampung**

Pemerintah Kota Bandar lampung dalam program melokalkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / SDGs, pada Tahun 2024 memfokuskan pada 8 (delapan) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs terdiri dari :

- TPB 1 :Mengakhiri segala bentuk kemiskinan
- TPB 3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
- TPB 4 : Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
- TPB 5 : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan
- TPB 6 :Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
- TPB 8 : Menjamin pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif
- TPB 11: Menciptakan kota dan permukiman yang berkelanjutan
- TPB 13: Mengambil langkah dan tindakan darurat yang diperlukan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya





**Ketercapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Bandar Lampung  
Sebagai Komitmen SDGs**

**TPB 1 Tanpa Kemiskinan**

Kota Bandar saat ini sedang mengalami perubahan dan pertumbuhan berkelanjutan yang signifikan. Transformasi ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan kota, termasuk infrastruktur, pelayanan publik, dan kualitas hidup warga. Upaya untuk mencapai standar perkotaan yang berkelanjutan menjadi semakin penting dalam konteks ini. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kemiskinan, yang memerlukan pendekatan komprehensif dan terukur untuk diatasi.

Dalam rangka mengatasi kemiskinan di Kota Bandar Lampung, Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 mengimplementasikan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) sebagai metode pengukuran kemiskinan. Pendekatan ini memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan ekonomi individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup makanan dan nonmakanan. Dengan kata lain, kemiskinan diukur berdasarkan tingkat pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut.

Lebih lanjut, pendekatan ini menekankan bahwa penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ini ditentukan berdasarkan sejumlah indikator yang mencerminkan biaya minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dengan menggunakan pendekatan ini, BPS dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai tingkat kemiskinan dan kondisi sosial ekonomi di Kota Bandar Lampung.

Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)			
	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Miskin	93,74	98,76	90,51	87,08

Jumlah Penduduk Miskin di Kota Bandar Lampung (2020-2023)  
Sumber: BPS, 2024

Jumlah penduduk miskin di Kota Bandar Lampung mengalami penurunan dari tahun 2021 yaitu sebesar 98,76 ribu jiwa menjadi 90,51 ribu jiwa di tahun 2022. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan yang dikarenakan oleh penyebaran virus COVID-19. Kemudian pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin di Kota Bandar Lampung kembali mengalami penurunan menjadi 87,08 ribu jiwa, dan menjadikan tahun 2023 sebagai tahun dengan jumlah penduduk miskin terendah dalam empat tahun terakhir. Berdasarkan data tersebut dapat menunjukkan peran serius dari Kota Bandar Lampung dalam upaya menurunkan jumlah penduduk miskin di Kota Bandar Lampung.

<b>Persentase Penduduk Miskin</b>	<b>Persentase Penduduk Miskin (%)</b>			
	2020	2021	2022	2023
Persentase Penduduk Miskin	8,81	9,11	8,21	7,77

Persentase Penduduk Miskin di Kota Bandar Lampung (2020-2023)

Sumber: BPS, 2024

Data yang dihasilkan dari pengukuran ini tidak hanya penting untuk memahami kondisi kemiskinan secara kuantitatif, tetapi juga sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan dan program intervensi yang lebih efektif. Pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dapat menggunakan informasi ini untuk merancang strategi yang tepat dalam upaya pengentasan kemiskinan, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, serta menciptakan peluang ekonomi yang lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

<b>Garis Kemiskinan</b>	<b>Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)</b>			
	2020	2021	2022	2023
Garis Kemiskinan	634.743	654.576	698.598	761.790

Garis Kemiskinan di Kota Bandar Lampung (2020-2023)

Sumber: BPS, 2024





Mengentaskan kemiskinan tentu bukan pekerjaan mudah yang dapat diselesaikan secara sektoral. Namun perlu dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan. Banyak upaya yang harus ditempuh. Dan inipun harus diiringi dengan sinergitas antar lembaga yang kuat, penganggaran yang memadai serta dukungan dari masyarakat itu sendiri. Tidak kalah pentingnya, upaya mencari akar masalah mengapa kemiskinan masih terjadi di Kota Bandar Lampung serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun beberapa tantangan nyata yang dihadapi oleh pemerintah Kota Bandar Lampung dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kota Bandar Lampung antara lain:

1. Kemiskinan sering dikaitkan dengan pengangguran, sehingga penyediaan lapangan kerja dengan upah minimal sesuai UMK 2023 Rp. 2.991.349 sangat penting. Data akurat tentang pengangguran di Bandar Lampung, termasuk alasan, pengalaman kerja, dan pekerjaan yang diinginkan, juga dibutuhkan.
2. Peningkatan ekonomi keluarga miskin harus menjadi prioritas pemerintah daerah, dengan memberikan peluang berwirausaha, akses permodalan, meningkatkan kualitas produksi dan pengemasan, serta menciptakan pasar terbuka.
3. Menghapus mentalitas kurang produktif keluarga miskin seperti kurang tekun dan kurang serius bekerja sangat penting. Pemerintah daerah harus mengefektifkan kerja Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan (TKPK) di berbagai tingkat dan mengoptimalkan kinerja kader penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan akses dan kepedulian sosial terhadap keluarga miskin, terutama yang miskin absolut.





## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Secara keseluruhan, perubahan dan pertumbuhan yang terjadi di Kota Bandar menawarkan peluang sekaligus tantangan. Dengan pendekatan yang tepat dan data yang akurat, diharapkan upaya-upaya untuk mencapai perkotaan yang berkelanjutan dan bebas dari kemiskinan dapat terwujud. Banyak faktor yang berhasil berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Kota Bandar Lampung pada tahun 2023, bentuk intervensi pemerintah kota diluncurkan melalui beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem

1. Pasar murah yang dilaksanakan secara rutin hampir pada setiap pekan dapat membantu menjaga kestabilan harga produk pasar
2. Bantuan modal untuk pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
3. Penyediaan panggung untuk produk UMKM Kota Bandar Lampung
4. Program pemberdayaan sosial
5. Program rehabilitasi sosial
6. Program perlindungan dan jaminan sosial
7. Program penanganan bencana.



Mengentaskan kemiskinan merupakan tugas yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan secara sektoral. Upaya ini memerlukan perencanaan yang terstruktur, terpadu, dan berkelanjutan. Diperlukan berbagai langkah yang disertai sinergi kuat antar lembaga, alokasi anggaran yang memadai, serta dukungan aktif dari masyarakat. Selain itu, penting untuk mengidentifikasi akar penyebab kemiskinan di Kota Bandar Lampung dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Pertama, kemiskinan sering diidentikkan dengan pengangguran. Oleh karena itu, penyediaan lapangan kerja dengan upah minimal sesuai UMK 2023 sebesar Rp. 2.991.349 sangat diperlukan. Data akurat *by name by address* penduduk yang menganggur di Bandar Lampung juga penting, termasuk alasan menganggur, pengalaman kerja, dan pekerjaan yang diinginkan. Penyediaan lapangan kerja harus menyesuaikan kebutuhan perusahaan dan menampung tenaga kerja yang belum terakomodir.

Kedua, setiap warga miskin adalah anggota keluarga. Oleh karena itu, peningkatan ekonomi keluarga juga harus menjadi prioritas program pemerintah daerah. Pengentasan kemiskinan harus mencakup kesempatan bagi keluarga miskin untuk berwirausaha, akses permodalan, peningkatan kualitas produksi dan pengemasan, serta penciptaan pasar yang terbuka.



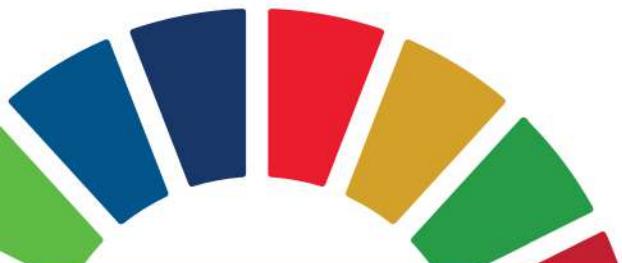


Ketiga, menghapus mental model keluarga miskin yang cenderung kurang produktif, seperti kurang tekun, kurang serius bekerja, dan kurang memanfaatkan waktu.

Selain itu, pemerintah daerah harus mengefektifkan kerja Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan (TKPK) di semua tingkatan. Pemerintah juga perlu mengoptimalkan kinerja kader penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan akses keluarga miskin dan meningkatkan kepedulian sosial.

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melakukan banyak program untuk menurunkan inflasi, seperti operasi pasar murah, sidak pasar, gerakan menanam, merealisasikan BTT, dan dukungan transportasi. Program pasar murah hampir setiap minggu menjaga kestabilan harga. Ada juga berbagai program bantuan untuk masyarakat terdampak Covid-19.

Tingkat kemiskinan ekstrem di Bandar Lampung tahun 2022 sebesar 1,8%, lebih kecil dari Provinsi Lampung (2,29%) dan nasional (2,04%). Target nasional tahun 2024 adalah 0%. Beberapa program pemerintah kota untuk menurunkan kemiskinan ekstrem adalah program pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta penanganan bencana.





## TPB 3 Kehidupan Sehat Dan Kesejahteraan



Pemerintah Kota Bandar Lampung menetapkan penurunan stunting sebagai prioritas utama untuk periode 2020-2024, dengan target pengurangan signifikan dari 24,4% pada tahun 2021 menjadi 14% pada tahun 2024. Selama periode 2021-2022, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk mempercepat penurunan angka stunting.

Program-program untuk mencapai tujuan TPB ke-3, yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera, fokus pada masa baduta (bawah dua tahun) sebagai periode penting (Window of Opportunity). Pada masa ini, anak memerlukan asupan gizi seimbang untuk mencapai berat dan tinggi badan optimal. Stunting, yang menggambarkan masalah gizi kronis, dipengaruhi oleh kondisi ibu, masa janin, masa bayi, serta penyakit yang diderita selama baduta. Masalah gizi ini tidak hanya terkait dengan kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang secara tidak langsung mempengaruhi kesehatan.

Pada 2020-2023, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mengadakan program operasi gratis bibir sumbing dan langit-langit untuk balita. Program ini merupakan bagian dari upaya merealisasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs TPB1, yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan, dengan tujuan mengembalikan fungsi mulut pasien. Pada 2023, program ini kembali dilakukan dengan pendanaan dari APBD Kota Bandar Lampung.



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Program ini ditujukan bagi warga kurang mampu dan telah memberikan banyak manfaat, sehingga memerlukan sinergi berbagai pihak untuk optimalisasi. Persyaratan operasi meliputi anak bibir sumbing minimal usia 3 bulan dengan berat 5 kg, dan pasien celah langit minimal usia 10 bulan dengan berat 10 kg. Jenis operasi yang dilayani meliputi perbaikan celah bibir, celah langit-langit, hidung miring, dan celah gusi. Selain itu, untuk mencapai TPB3 yaitu menjamin kehidupan sehat dan meningkatkan kesejahteraan, Kota Bandar Lampung menerima penghargaan dari Kompas TV sebagai Daerah Peduli Penanganan Stunting dan Layak Anak pada HUT ke-12 Kompas TV.

█ SSGI 2022      █ e-PPGBM Mei 2023



Pemerintah Kota Bandar Lampung menerima penghargaan Manggala Karya Kencana dari BKKBN atas dedikasi dalam program pengendalian penduduk dan kesejahteraan keluarga. Kota ini mencatat partisipasi tinggi, di mana 57% masyarakatnya melaksanakan Program Keluarga Berencana (KB). Melalui Program Bangga Kencana, Kota Bandar Lampung berhasil menurunkan angka stunting sebesar 8,3%, didukung oleh pengadaan mobil KB dan penyuluhan kesehatan untuk mencapai masyarakat di seluruh wilayah. Upaya ini sejalan dengan TPB3 untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan sehat bagi seluruh penduduk.



Peraturan Presiden No. 72/2021 mendorong penurunan stunting secara holistik dan integratif di daerah dengan koordinasi lintas lembaga dan pemerintah daerah. Kota Bandar Lampung menjadi contoh sukses dalam penurunan stunting dari 19,4% menjadi 11,1% pada 2022 berkat Program Bangga Kencana. Dinas PPKB membentuk TPPS untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi 0%, turun dari 19,6% sebelumnya. Penurunan ini dijadikan program prioritas nasional dengan pendekatan multi-sektor, didukung oleh ketersediaan sumber makanan bergizi dan kesadaran masyarakat yang tinggi.

Pemerintah Kota Bandar Lampung menerima penghargaan Manggala Karya Kencana dari BKKBN atas dedikasi dalam program pengendalian penduduk dan kesejahteraan keluarga. Kota ini mencatat partisipasi tinggi, di mana 57% masyarakatnya melaksanakan Program Keluarga Berencana (KB). Melalui Program Bangga Kencana, Kota Bandar Lampung berhasil menurunkan angka stunting sebesar 8,3%, didukung oleh pengadaan mobil KB dan penyuluhan kesehatan untuk mencapai masyarakat di seluruh wilayah. Upaya ini sejalan dengan TPB3 untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan sehat bagi seluruh penduduk.

Kota Bandar Lampung selama kurun waktu Tahun 2021-2022 melakukan berbagai kegiatan guna percepatan penurunan Stunting. Adapun program-program untuk merealisasikan Tujuan, Goals, TPB ke-3 yaitu Kehidupan Sehat Dan Sejahtera. Pemerintah kota bandar lampung telah menetapkan stunting sebagai prioritas dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi angka 6,65% di tahun 2021 menjadi angka 4,13% di tahun 2022. Sementara target nasional 24,4%. hal ini juga menunjukkan bukti keseriusan pemerintah kota bandar lampung dalam menurunkan angka Stunting.

Wilayah	SSGI 2022	Target 2023	Target 2024
Kota Bandar Lampung	Target Penurunan Stunting di Kota Bandar Lampung 11,1	13,48	10,77



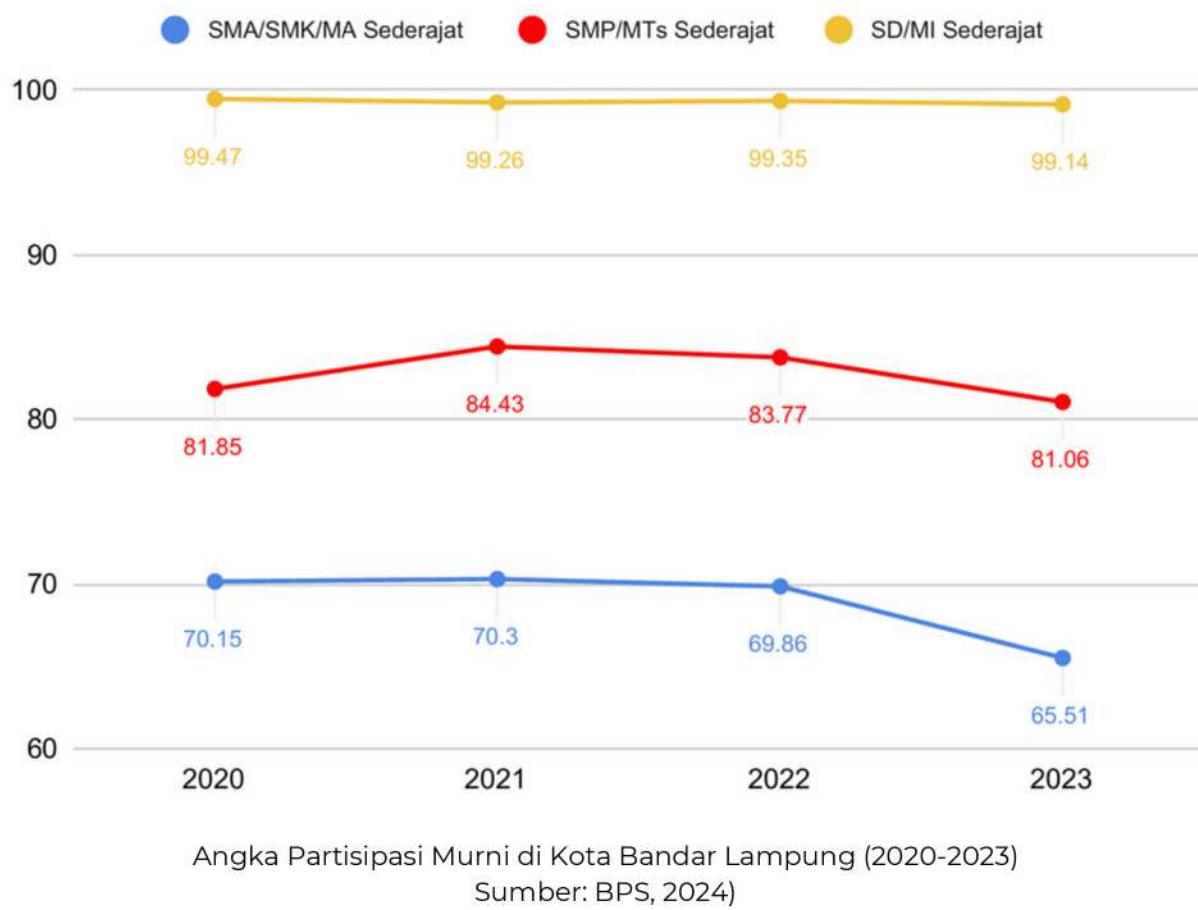
## TPB 4 Pendidikan Yang Berkualitas dan Bermutu

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas urusan wajib pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan, memiliki tujuan utama untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pembinaan kebudayaan secara berkelanjutan. Dengan mengacu pada kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan nasional, layanan berkualitas yang disediakan diharapkan dapat menghasilkan individu yang cerdas, terampil, dan kompetitif. Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung merupakan implementasi dari indikator kinerja di bidang pendidikan dan kebudayaan, yang bertujuan untuk mencapai visi tersebut tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal.



Sejak tahun 2013, pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013, menetapkan strategi nasional untuk Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI). PAUD-HI bertujuan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak secara simultan, sistematis, dan terintegrasi, dengan menyediakan layanan terintegrasi dan selaras antar lembaga melalui komitmen semua pihak terkait. Untuk mengimplementasikan Peraturan Presiden tersebut, Rencana Aksi Nasional (RAN) PAUD-HI 2020-2024 disiapkan sebagai panduan bagi pelaksanaan di pusat dan daerah. Namun, meskipun kerangka kerja nasional PAUD-HI telah ditetapkan, implementasi oleh pemerintah daerah sangat bervariasi, menyebabkan perbedaan signifikan dalam pembiayaan dan akses terhadap layanan PAUD-HI.

Evaluasi kinerja menunjukkan bahwa pencapaian hasil berada pada atau di atas target yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, kecuali untuk indikator rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, Angka Partisipasi Murni (APM) SD, dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP. Hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai masukan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun mendatang.



### Program SDG's

Program Bina Lingkungan (Biling) adalah inisiatif pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu di Kota Bandar Lampung yang telah dilaksanakan sejak tahun ajaran 2013/2014. Program ini memberikan dampak positif, seperti mensukseskan program wajib sekolah, meningkatkan angka partisipasi sekolah, dan meningkatkan jumlah masyarakat yang melek huruf. Pada tahun 2018, kuota siswa SMP dalam program Biling mencapai 6000 siswa dan meningkat dua kali lipat pada tahun 2020. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Zonasi Bina Lingkungan (Biling) atau Afirmasi untuk SMP negeri se-Kota Bandar Lampung, dibuka serentak pada tanggal 4-6 Juli 2022.





Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bandar Lampung, program utama yang diusung adalah pengelolaan pendidikan. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengimplementasikan sejumlah proyek pembangunan pendidikan, baik fisik maupun non fisik, untuk jenjang SD dan SMP. Proyek-proyek fisik meliputi:

1. Pembangunan 46 Unit Sekolah Baru (USB), penambahan ruang kelas baru, pembangunan UKS, serta pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas sekolah. Selain itu
2. Pemerintah melaksanakan rehabilitasi sedang dan berat untuk ruang kelas, perpustakaan, sarana, prasarana, dan utilitas sekolah,
3. Pengadaan perlengkapan bagi siswa dan sekolah.

Selain itu, upaya pembangunan non-fisik meliputi:

1. Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik
2. Pembinaan minat dan bakat serta kreativitas siswa
3. Meningkatkan kualitas PAUD berdasarkan HI (Holistik Integratif) yaitu penanganan anak usia dini secara utuh yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan, dan pengasuhan serta perlindungan
4. Pemerataan kualitas pendidikan dengan memberikan bantuan pendidikan beasiswa bagi tenaga pendidik atau guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 dan S3





## Tantangan Pada Dunia Pendidikan

- 1. Ketidaksiapan Guru dalam Menggunakan Teknologi.** Banyak siswa dan guru dengan penghasilan rendah tidak memiliki perangkat digital atau keterampilan yang diperlukan untuk pembelajaran berbasis digital atau online. Menurut data UNICEF tahun 2020, sebanyak 67% guru melaporkan kesulitan dalam mengoperasikan perangkat dan menggunakan platform online dalam proses pembelajaran.
- 2. Globalisasi.** Standar kualitas sekolah dan lulusannya kini diukur tidak hanya dalam skala lokal atau nasional, tetapi juga dalam skala global. Oleh karena itu, kualitas pendidikan di Kota Bandar Lampung harus dijalankan sesuai dengan standar internasional.
- 3. Perubahan Pola Belajar.** Dengan pesatnya perkembangan teknologi pola belajar masyarakat akan terus berubah. Pendidikan harus mampu mengadaptasi pola belajar yang baru ini.
- 4. Keterbatasan Kurikulum.** Kurikulum yang terbatas mungkin tidak mampu mencakup semua materi yang dibutuhkan oleh siswa di masa depan. Pendidikan harus mampu menyediakan materi yang tepat dan relevan sesuai dengan kebutuhan siswa di masa mendatang.
- 5. Masalah Keuangan.** Pendidikan di beberapa daerah mungkin mengalami masalah keuangan, sehingga tidak dapat memberikan layanan berkualitas kepada siswa.
- 6. Persaingan Global.** Persaingan global akan semakin ketat di masa depan, sehingga pendidikan harus mampu menyiapkan siswa agar dapat bersaing di tingkat internasional.



**Beberapa hal yang diperlukan dalam memenuhi tantangan pendidikan di masa depan:**

1. Kurikulum yang Relevan: Kurikulum harus diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masa depan siswa. Materi pengajaran perlu bermanfaat dan relevan dengan tuntutan masa depan.
2. Pendidikan yang Inklusif: Pendidikan harus menyediakan kesempatan yang setara bagi semua siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus.
3. Teknologi yang Tepat: Penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar harus tepat guna, sehingga siswa dapat belajar dengan lebih efektif.
4. Sumber Daya Manusia yang Berkualitas: Guru dan tenaga pendidik harus terlatih dengan baik dan memiliki kompetensi yang memadai untuk mendidik siswa di masa depan.
5. Lingkungan Belajar yang Nyaman: Lingkungan belajar harus dibuat nyaman dan kondusif, agar siswa dapat belajar dengan lebih efektif.
6. Kepemimpinan yang Efektif: Kepemimpinan yang efektif di sekolah dan lembaga pendidikan merupakan faktor kunci dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.



**Data Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid pada masing-masing jenjang pendidikan di Kota Bandar Lampung:**

Variabel	Taman Kanak-Kanak (TK)					
	Negeri		Swasta		Total	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
Jumlah Sekolah	4	4	366	373	370	377
Jumlah Guru	28	30	1.971	2.057	1.999	2.087
Jumlah Murid	200	235	14.382	17.017	14.582	17.252

Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-kanak di Kota Bandar Lampung

Sumber: BPS, 2024

Jumlah	Raudhatul Athfal (RA)					
	Jumlah Sekolah		Jumlah Guru		Jumlah Murid	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
Jumlah Sekolah	19	24	129	141	1.219	1.168

Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Raudhatul Athfal (RA) di Kota Bandar Lampung

Sumber: BPS, 2024

Variabel	Sekolah Dasar (SD)					
	Negeri		Swasta		Total	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
Jumlah Sekolah	167	167	73	74	240	241
Jumlah Guru	3.348	3.524	1.620	1.545	4.968	5.069
Jumlah Murid	67.925	66.119	22.812	22.806	90.737	88.925

Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Kota Bandar Lampung

Sumber: BPS, 2024



**Data Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid pada masing-masing jenjang pendidikan di Kota Bandar Lampung:**

Variabel	Madrasah Ibtidaiyah (MI)					
	Negeri		Swasta		Total	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
Jumlah Sekolah	12	12	50	50	62	62
Jumlah Guru	395	380	641	671	1.038	1.051
Jumlah Murid	7.308	7.198	10.042	9.931	17.350	17.129

Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kota Bandar Lampung

Sumber: BPS, 2024

Variabel	Sekolah Menengah Pertama (SMP)					
	Negeri		Swasta		Total	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
Jumlah Sekolah	45	45	93	94	138	139
Jumlah Guru	2.071	2.114	1.134	1.091	3.205	3.205
Jumlah Murid	33.537	33.374	11.964	12.228	45.501	45.602

Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Bandar Lampung

Sumber: BPS, 2024

Variabel	Madrasah Tsanawiyah (MTs)					
	Negeri		Swasta		Total	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
Jumlah Sekolah	2	2	27	27	29	29
Jumlah Guru	193	186	370	361	563	547
Jumlah Murid	2.103	2.251	3.942	3.848	6.045	6.099

Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kota Bandar Lampung

Sumber: BPS, 2024



**Data Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid pada masing-masing jenjang pendidikan di Kota Bandar Lampung:**

Variabel	Sekolah Menengah Atas (SMA)					
	Negeri		Swasta		Total	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
Jumlah Sekolah	17	17	50	50	67	67
Jumlah Guru	912	904	909	932	1.821	1.836
Jumlah Murid	15.491	15.549	11.782	12.769	27.273	28.318

Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandar Lampung

Sumber: BPS, 2024

Variabel	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)					
	Negeri		Swasta		Total	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
Jumlah Sekolah	10	10	52	51	62	61
Jumlah Guru	806	812	808	757	1.614	1.569
Jumlah Murid	13.158	13.288	9.713	9.278	22.871	13.288

Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Bandar Lampung

Sumber: BPS, 2024

Variabel	Madrasah Aliyah (MA)					
	Negeri		Swasta		Total	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
Jumlah Sekolah	2	2	13	13	15	15
Jumlah Guru	212	222	135	155	347	377
Jumlah Murid	2.384	2.335	1.581	1.508	3.965	3.843

Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Aliyah (MA) di Kota Bandar Lampung

Sumber: BPS, 2024





Untuk mewujudkan TPB poin nomor empat, yaitu memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, telah disusun indikator pendidikan berdasarkan data dari indikator sosial budaya BPS tahun 2023, dengan acuan sebagai berikut:

1. Bersekolah: Terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan formal (SD, SMP, SMA, pendidikan tinggi) atau non-formal (Paket A, B, C) yang diawasi oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, atau instansi lainnya, baik negeri maupun swasta.
2. Pendidikan non-formal: Jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang bisa dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
3. Tidak/belum pernah sekolah: Belum pernah terdaftar atau aktif mengikuti pendidikan pada suatu jenjang.
4. Tamat sekolah: Telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat terakhir suatu jenjang.
5. Angka Buta Huruf: Proporsi penduduk usia tertentu yang tidak bisa membaca atau menulis.
6. Angka Partisipasi Sekolah (APS): Proporsi anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu sesuai kelompok usianya.
7. Angka Partisipasi Murni (APM): Proporsi anak pada kelompok usia tertentu yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikan kelompok usianya.
8. Angka Partisipasi Kasar (APK): Proporsi anak bersekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai.





## TPB 5 Kesetaraan Gender

### Indeks Gender Kota Bandar Lampung

Dalam Pilar Pembangunan Sosial SDGs Indonesia, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung berkontribusi pada Tujuan 5 (lima) yaitu "Mencapai Kesetaraan Gender". Kesetaraan gender merupakan salah satu isu global. Oleh karenanya mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan menjadi salah satu tujuan dalam pembangunan berkelanjutan (SDGs). Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Bandar Lampung Tahun 2022 sebesar 94.02, dan pada Tahun 2023 sebesar 94.02 angka ini sudah melewati dari target 2026 yang telah ditetapkan sebesar 93.96. sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada Tahun 2022 sebesar 72,33 dan pada Tahun 2023 sebesar 72,33 dari target 2026 sebesar 74.00.

Tahun 2023 Dinas PPPA Kota Bandar Lampung masih dalam tahap mempersiapkan indikator serta membangun komitmen seluruh OPD dan Stakeholder untuk menjadikan Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak. Dan pada Tahun 2023 Kota Bandar Lampung mendapat Predikat KLA Nindya dengan perhitungan Nilai 730.

Sasaran pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sampai dengan akhir tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan
2. Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak
3. Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
4. Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak
5. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak





# PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Tujuan 5 (lima) yaitu “Mencapai Kesetaraan Gender” yang diuraikan dalam beberapa indikator yang terlihat dalam berikut. (Sumber: Dinas PPPA Kota Bandar Lampung).

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Pencapaian								
					2020	2021	2022	2023	2024				
<b>Target 5.1</b>													
<b>Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.</b>													
5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.	APB D	%	100		100	100	100	100				
<b>Target 5.2</b>													
<b>Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksplorasi seksual, serta berbagai jenis eksplorasi lainnya.</b>													
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	DAK	%	100		100	100	100	100				



Untuk mencapai indikator-indikator tersebut Dinas PPPA Kota Bandar Lampung merancang beberapa program dan kegiatan seperti terlihat dalam Tabel Lampiran di atas. Dari Tabel tersebut diketahui Dinas PPPA memiliki sebelas program terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender. Sebelas program tersebut yaitu:

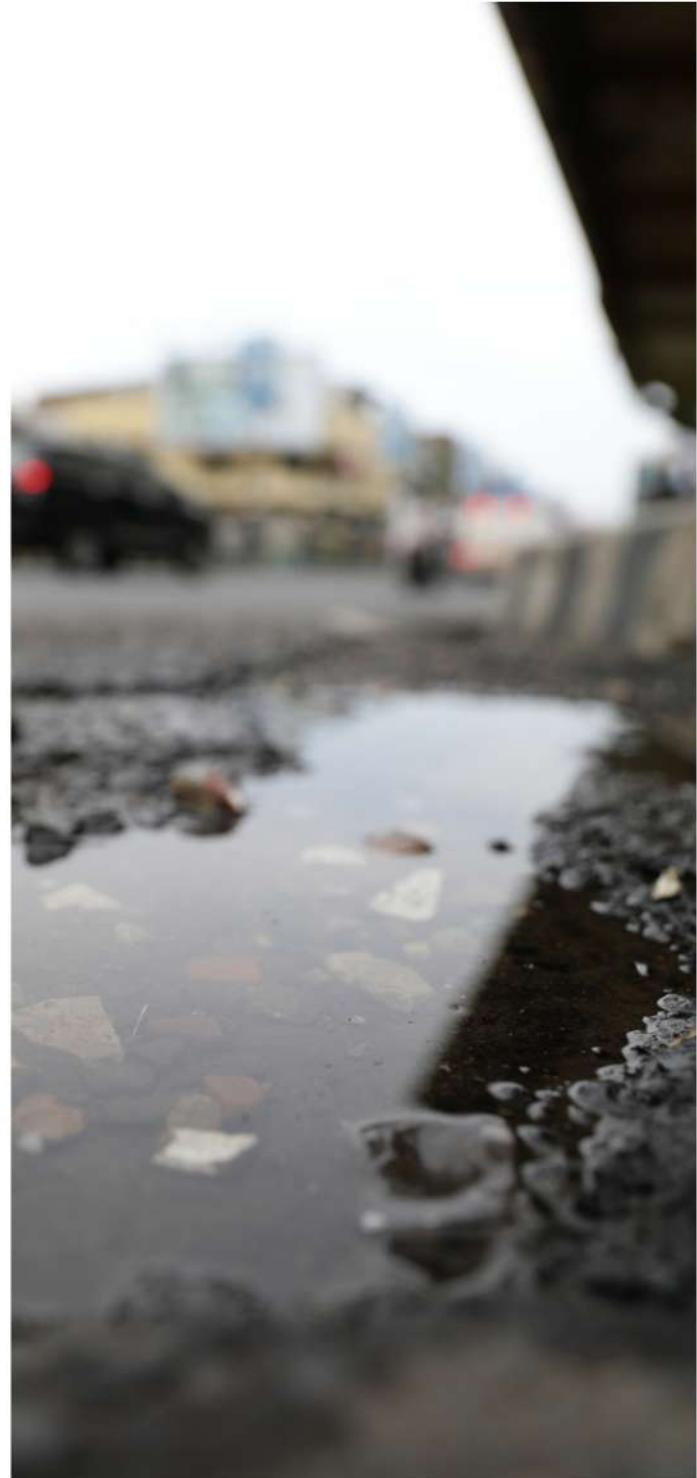
1. Program perlindungan perempuan
2. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota
3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota
4. Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota
5. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota
6. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban tindak kekerasan kewenangan kabupaten/kota (dak)
7. Program perlindungan khusus anak
8. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota
9. Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota terhadap anak kewenangan kabupaten/kota.
10. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota.
11. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota.



## TPB 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

Dalam pilar pembangunan lingkungan SDGs Indonesia point ke 6 adalah air bersih dan sanitasi layak yaitu menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang. Sanitasi dan kesehatan memiliki hubungan yang erat dan tidak bisa dipisahkan seperti layaknya air bersih dan sanitasi. Sanitasi yang tidak layak dan tidak aman akan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat yang nantinya akan berdampak pada proses sebuah pembangunan.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung memiliki kontribusi dalam Tujuan 6 (enam) yaitu "Air Bersih dan Sanitasi Layak" dengan Target 6.1 yaitu "mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua" dan Target 6.2 yaitu "mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan di tahun 2030". Target pencapaian Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dalam mencapai hal tersebut dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. (Sumber: Dinas PU Kota Bandar Lampung).





# PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Pencapaian								
					2020	2021	2022	2023	2024				
<b>Target 6.1</b>													
<b>Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.</b>													
6.1.1*	Percentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	1. LAKIP TA 2020 2. RENSTRA DPU TA 2021-2026	%	44,80	61,8	62,3	62,8	63,3	63,8				
<b>Target 6.2</b>													
<b>Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.</b>													
6.2.1*	Percentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	1. LAKIP TA 2020 2. RENSTRA DPU TA 2021-2026	%	35,96	50,88	60,5	61	61,5	62				



Dari Tabel di atas terlihat target pencapaian Dinas PU Kota Bandar Lampung dalam indikator rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman adalah 63,8% di tahun 2024 dan target rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun sebesar 62% ditahun 2024. Kedua target capaian tersebut jauh di atas angka dasar (baseline). Ini menunjukkan komitmen yang sangat tinggi dari Kota Bandar Lampung dalam mencapai Tujuan 6 (enam).

Untuk mencapai target tersebut Dinas Pekerjaan Umum menurunkan program dan kegiatan sebagaimana terlihat dalam Tabel 5.6 pada Lampiran. Dari Tabel 5.6 tersebut dapat diketahui bahwa untuk mencapai Indikator 6.1.1 yaitu "percentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman", Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung membuat program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan AirMinum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota dengan kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan dengan anggaran Rp. 35.703.752.437,50 dalam lima tahun anggaran.



Selanjutnya untuk mencapai indikator 6.2.1 yaitu "persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun", Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung membuat program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 31.474.724.758,13 dalam lima tahun anggaran.

## TPB 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI



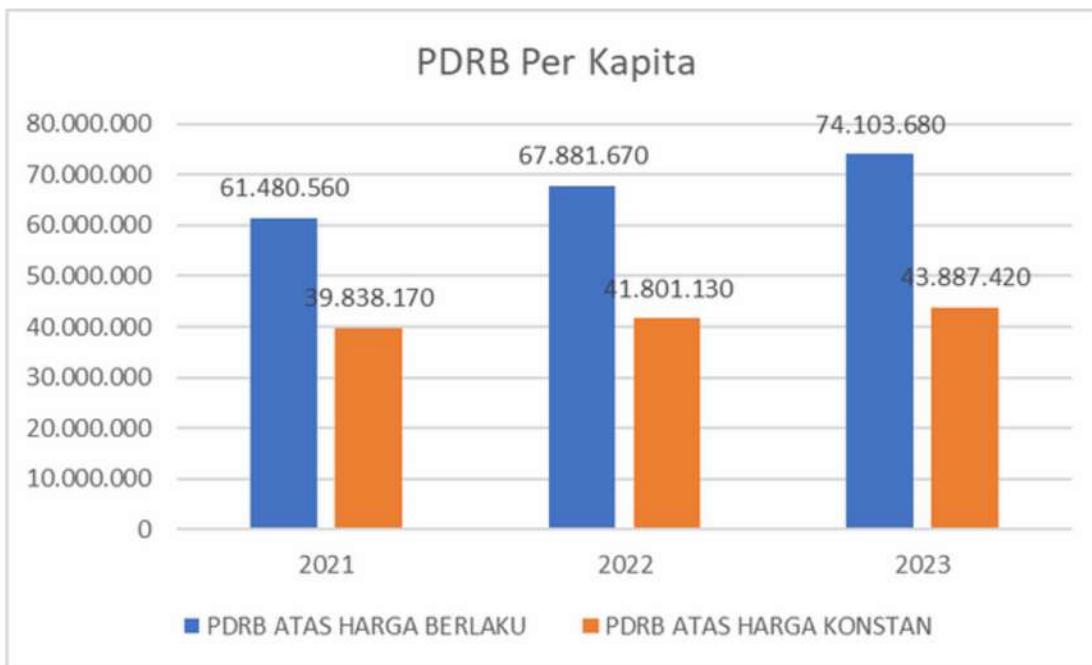
TPB 8 merupakan salah satu tujuan global yang ingin mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua. Pembahasan dalam bagian ini akan lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan di Kota Bandar Lampung antara tahun 2021 hingga 2023. Secara keseluruhan, perekonomian Kota Bandar Lampung terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu indikator ekonomi yakni PDRB perkapita. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kota Bandar Lampung selama tiga tahun terakhir telah menunjukkan tren peningkatan.

Sejak tahun 2021 hingga 2023, PDRB per kapita, baik itu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Bandar Lampung terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bandar Lampung sebesar 61,480 juta rupiah dan terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 74,103 juta rupiah di tahun 2023, sedangkan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan di Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan dari 39,838 juta rupiah di tahun 2021 hingga mencapai 43,887 juta rupiah di tahun 2023.





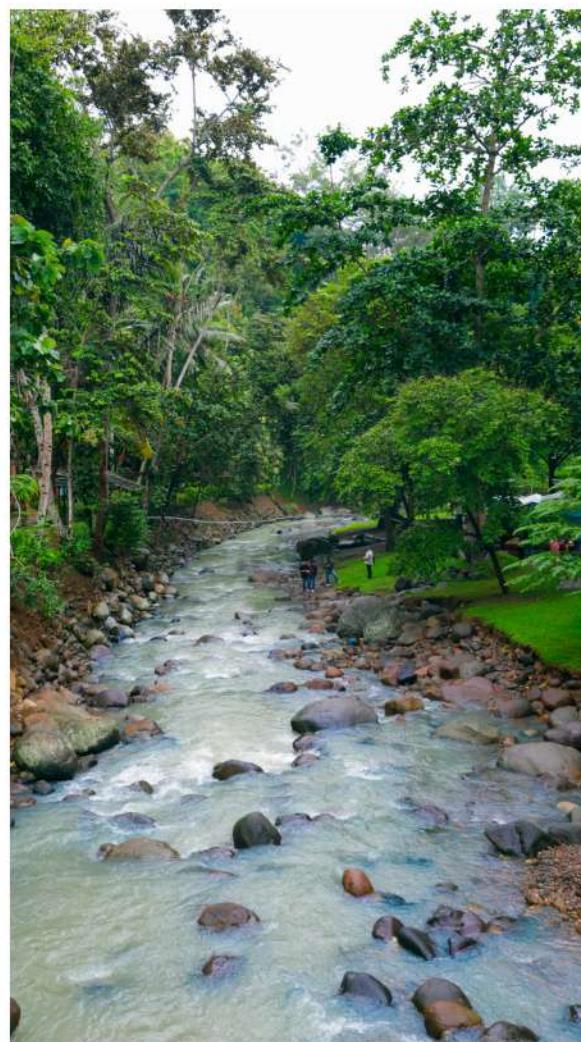
## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

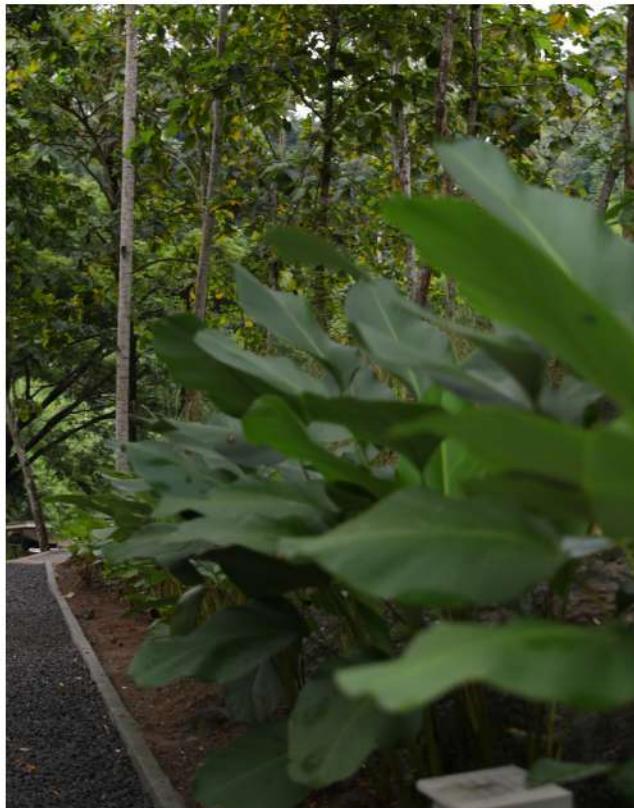
Jika dilihat berdasarkan laju pertumbuhannya, laju pertumbuhan PDRB per kapita Kota Bandar Lampung menunjukkan tren peningkatan yang cenderung fluktuatif.

Selain berfokus terhadap PDRB Bandar lampung, Pemerintah Bandar Lampung juga memperhatikan sektor Pariwisata dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua. Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung dalam Tujuan 8 (delapan) memiliki kontribusi dalam Indikator 8.9.1.(a) yaitu "jumlah wisatawan mancanegara" yang dihitung berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Bandar Lampung, dan Indikator 8.9.1.(b) yaitu "jumlah kunjungan wisatawan nusantara" yang merupakan banyaknya perjalanan kurang dari 6 bulan yang dilakukan oleh penduduk dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan perjalanan kurang dari





# PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG



6 bulan yang dilakukan oleh penduduk dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan perjalanan rutin (sekolah atau bekerja), dengan mengunjungi obyek wisata komersial, dan/atau menginap di akomodasi komersial, dan/atau jarak perjalanan lebih besar atau sama dengan 100 (seratus) kilometer pergi-pulang. Target pencapaian pada Tujuan 8 ini tergambar dalam Tabel di bawah ini. (Sumber: Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung).

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Pencapaian					
					2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Target 8.9</b>										
<b>Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.</b>										
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Pendataan langsung ke objek wisata, hotel dan penginapan	orang		1.767	2.000	1.767	1.855	1.948	
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Pendataan langsung ke objek wisata, hotel dan penginapan	orang		819.4 92	215.6 23	819.4 92	860.4 67	903.4 90	

Untuk mencapai target yang telah ditentukan, Dinas Pariwisata menurunkan program Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata. Untuk mencapai target di atas, Dinas Pariwisata mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 238.066.948,43 dan Rp. 306.086.076,56 untuk dua kegiatan yaitu Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dalam lima tahun anggaran.



## TPB 11 KOTA DAN PERMUKIMAN BERKELANJUTAN

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung berkontribusi pada Tujuan 11 SDGs, yang berfokus pada menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan dalam Pilar Pembangunan Lingkungan SDGs Indonesia. Tujuan ini memiliki dua target utama: Target 11.1 yang bertujuan untuk menjamin akses terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, serta pelayanan dasar bagi semua dan menata kawasan kumuh, dan Target 11.7 yang bertujuan menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif, dan mudah dijangkau, khususnya bagi perempuan, anak-anak, manula, dan penyandang disabilitas.

**Tabel 2. Target Pencapaian SDGs 11 (Sumber: Dinas Perkim Kota Bandar Lampung)**

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Pencapaian (8)								
					2020	2021	2022	2023	2024				
<b>Target 11.1</b>													
Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.													
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Dinas Perumahan dan Permukiman	%		28,81	32,68	23,63	43,89	64,14				
<b>Target 11.7</b>													
Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas													
11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	Dinas Perumahan dan Permukiman	%		4,4	4,4	4,4	4,6	4,8				

Berdasarkan Tabel 2. target pencapaian Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung pada tahun 2024 adalah 64,14% rumah tangga memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau, serta 4,8% proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua.

Untuk mencapai target ini, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung telah merancang program dan kegiatan yang tercantum dalam Tabel 5.7 pada lampiran. Dari tabel tersebut, diketahui bahwa Dinas memiliki dua program utama:

1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha dengan anggaran sebesar Rp. 109.344.866.040,85 dalam lima tahun.

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 21.565.685.894,00 dalam lima tahun.



---

**TPB 11 KOTA DAN PERMUKIMAN BERKELANJUTAN****Tujuan 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan**

Panjang jalan di Kota Bandar Lampung mencapai 1.556,216 km, yang memerlukan anggaran besar untuk pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan. Pada tahun 2024, pemerintah terus memperbaiki infrastruktur jalan dan drainase dengan pencapaian sekitar 80% dari target. Salah satu perbaikan signifikan adalah pada Flyover Gajah Mada yang dilakukan secara menyeluruh untuk menghindari gangguan lalu lintas yang berat.

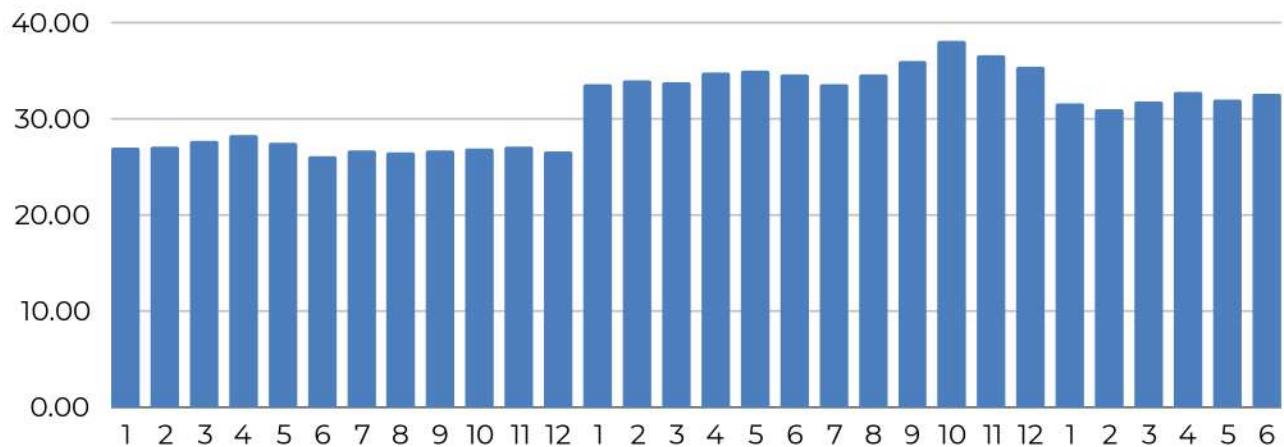
Koordinasi distribusi air antara PDAM dan Dinas PU masih belum optimal, mempengaruhi efisiensi layanan air bersih. Selain itu, masih banyak penduduk yang belum mengelola air limbah dengan benar, dan sanitasi lingkungan masih rendah. Panjang jaringan drainase Kota Bandar Lampung mencapai 117,551 km, sedangkan panjang sungainya mencapai 66,952 km. Untuk meningkatkan pengelolaan ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp20 miliar untuk memperbaiki drainase di beberapa titik banjir pada tahun 2022, yang terus dilanjutkan di tahun 2024.

Pada tahun 2024, upaya peningkatan implementasi SDGs di Kota Bandar Lampung terus didukung oleh pemerintah nasional dan internasional. Melalui kerjasama dengan berbagai pihak seperti SDGs Center Universitas Lampung dan United Cities Local Government Asia Pacific, Kota Bandar Lampung telah mengadakan berbagai workshop dan rapat koordinasi untuk mengevaluasi dan meningkatkan pencapaian SDGs.



## TPB 13 PERUBAHAN IKLIM

Tujuan 13 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) berfokus pada tindakan segera untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya. Perubahan iklim merupakan tantangan global yang berdampak pada semua orang.



Sumber : Baperida Kota Bandar Lampung

Tujuan 13 tentang perubahan iklim mencakup data grafik suhu maksimum bulanan dari tahun 2021 hingga 2023. Grafik menunjukkan lonjakan suhu tertinggi terjadi pada bulan November 2022, mencapai 37 derajat Celsius. Sebaliknya, suhu terendah tercatat pada bulan Januari 2021.

Pemerintah Provinsi Lampung berusaha meningkatkan jumlah Program Kampung Iklim (Proklim) di 15 kabupaten dan kota untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan mengantisipasi potensi bencana. Bersama pemerintah pusat, mereka telah mencanangkan berbagai upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, dampak perubahan iklim termasuk bencana hidrometeorologi dan kerusakan ekosistem. Proklim menjadi salah satu cara untuk menangani masalah ini.



## TPB 13 PERUBAHAN IKLIM

Tabel 2. Tabel Rata-Rata Suhu Udara Maksimum

Bulan	Rata-rata Suhu Udara Maksimum (°Celcius)		
	2021	2022	2023
Januari	33.40	27.00	33.60
Februari	32.80	27.10	34.00
Maret	34.00	27.70	33.80
April	34.40	28.30	34.80
Mei	34.00	27.50	35.00
Juni	34.00	26.10	34.60
Juli	34.00	26.70	33.60
Agustus	34.40	26.50	34.60
September	34.20	26.70	36.00
Oktober	34.80	26.90	38.10
November	34.60	27.10	36.60
Desember	34.60	26.60	35.40

Sumber : Baperida Kota Bandar Lampung

Tabel tersebut menampilkan rata-rata suhu udara dari tahun 2021 hingga 2023. Data menunjukkan bahwa suhu terendah tercatat pada bulan Januari 2021 dengan nilai 26.10 derajat Celsius, sementara suhu tertinggi terjadi pada bulan April 2022 dengan nilai 38.10 derajat Celsius. Jika diperhatikan, rata-rata suhu tahunan cenderung mengalami kenaikan.

### Tujuan 13 Peningkatan Ketahanan Kota Bandar Lampung terhadap Dampak Perubahan Iklim

Peningkatan ketahanan Kota Bandar Lampung terhadap dampak perubahan iklim menjadi fokus utama pemerintah daerah, dengan dukungan dari berbagai pihak termasuk Mercy Corps melalui program ACCCRN. Program ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan, melakukan kajian kerentanan, dan menjalankan berbagai aksi adaptasi dan mitigasi. Pada 2024, salah satu program yang digiatkan adalah "Kampung Iklim" yang bertujuan mendorong keterlibatan masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Bandar Lampung telah menjadi contoh bagi kota-kota lain dengan berbagai inisiatif lokal yang melibatkan komunitas secara langsung.

Namun, Bandar Lampung menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan sampah dan mitigasi dampak perubahan iklim. Misalnya, gas metana dari TPA Bakung yang mempengaruhi pemanasan global. Meskipun pemerintah daerah berupaya meningkatkan kapasitas adaptif melalui kebijakan yang adil dan kolaborasi dengan berbagai pihak, implementasi perubahan iklim masih perlu ditingkatkan.



## TPB 13 PERUBAHAN IKLIM

### Penerapan SDGs

Pada tahun 2024, penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 13 di Kota Bandar Lampung melibatkan berbagai upaya dan dukungan dari tingkat nasional dan internasional. Pemerintah Provinsi Lampung telah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB untuk periode 2020-2024 yang mencakup berbagai strategi untuk memperkuat ketahanan iklim. Penyusunan RAD ini melibatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk universitas dan LSM lokal. Universitas Lampung melalui SDGs Center aktif mendukung implementasi SDGs dengan menyediakan platform monitoring dan evaluasi yang mempermudah pelaksanaan dan pengawasan TPB di Provinsi Lampung.

Selain itu, pemerintah kota bekerja sama dengan Mercy Corps melalui program ACCCRN yang berfokus pada penguatan kelembagaan, kajian kerentanan, dan strategi ketahanan kota terhadap perubahan iklim. Kebijakan nasional seperti Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 dan Kepmen No. 168 Tahun 2022 juga mendukung inisiatif lokal untuk mencapai target FOLU Net Sink 2030, yaitu keseimbangan antara emisi dan serapan gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Beberapa program konservasi dan pengelolaan lingkungan juga dilaksanakan, seperti pengembangan kawasan konservasi perairan dan kawasan konservasi pesisir yang berkontribusi terhadap tujuan SDGs 13.





## BAB 3



# NILAI DAN KONTEN PEMBANGUNAN

RAD SDGs Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2024 adalah sebuah landasan kunci untuk memantau kemajuan pencapaian SDGs di wilayah tersebut. Meskipun tidak semua tujuan SDGs dapat diukur kemajuannya, dokumen VLR ini berusaha untuk mendokumentasikan progres pencapaian target-target SDGs di Kota Bandar Lampung. Dokumen ini mengandalkan data indikator yang dapat dikumpulkan serta informasi mengenai kebijakan, perencanaan, dan program kegiatan unggulan yang terkait dengan tujuan SDGs tertentu sebagai dasar penyusunannya. Evaluasi kemajuan ini mengacu pada empat Pilar Pembangunan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah ditetapkan oleh Bappenas.

## Nilai dan Konten Pembangunan Kota Bandar Lampung Tanpa Kemiskinan

Percentase Penduduk Miskin	Percentase Penduduk Miskin (Persen)										
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Persentase Penduduk Miskin	7,77	8,21	9,11	8,81	8,71	9,04	9,94	10,15	10,33	10,67	10,85

Percentase jumlah penduduk miskin di Kota Bandar Lampung (%) Tahun  
2013-2023

Sumber : BPS, 2024

Badan Pusat statistik (BPS) Kota Bandar Lampung mencatat penurunan persentase penduduk yang berada di garis kemiskinan dari waktu ke waktu, pada tahun 2013 persentase jumlah penduduk miskin di Kota Bandar Lampung sebesar 10,85%, dan pada tahun 2014 jumlah tersebut turun menjadi 10,67%. Pada tahun berikutnya 2015 persentase tersebut turun menjadi 10,33%, semetara di tahun 2016 menjadi 10,15%, tahun 2017 sebesar 9,94%, dan tahun 2018 sebesar 9,04%. Persentase penduduk miskin ini juga terus mengalami penurunan pada 2 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2019 menjadi 8,71%, tahun 2020 sebesar 8,81%.

Namun, pada tahun 2021 persentase tersebut mengalami kenaikan imbas dari pandemi Covid-19 menjadi 9,11%. Pada 2 tahun terakhir persentase jumlah penduduk miskin di Kota Bandar Lampung turut mengalami penurunan bersamaan dengan berakhirnya status pandemi di Indonesia, pada tahun 2022 sebesar 8,21% dan 2023 sebesar 7,77%. Dalam kurun waktu 11 tahun Kota Bandar Lampung mampu menurunkan persentase jumlah penduduk miskin sebesar 3,08%, angka ini jauh lebih besar dibandingkan penurunan persentase kemiskinan nasional sebesar 2,06%.



Berdasarkan keputusan KEPUTUSAN GUBERNUR No. 178 Tahun 2024 pemerintahan Provinsi Lampung telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tahun 2024-2026. Tim ini memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dan sinergitas, baik dalam bentuk penyusunan strategi, kebijakan, pemantauan serta penyusunan dokumen perencanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung. Adapun yang menjadi fungsi dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) ini sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana penanggulangan kemiskinan daerah dan rencana aksi
2. Koordinasi penyusunan rancangan Rencana Kerja di bidang penanggulangan kemiskinan
3. Koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan
4. Fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan
5. Penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan
6. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundungan
7. Harmonisasi penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan





Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) ini memiliki 3 kelompok program yang terdiri dari :

### 1. Program Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat

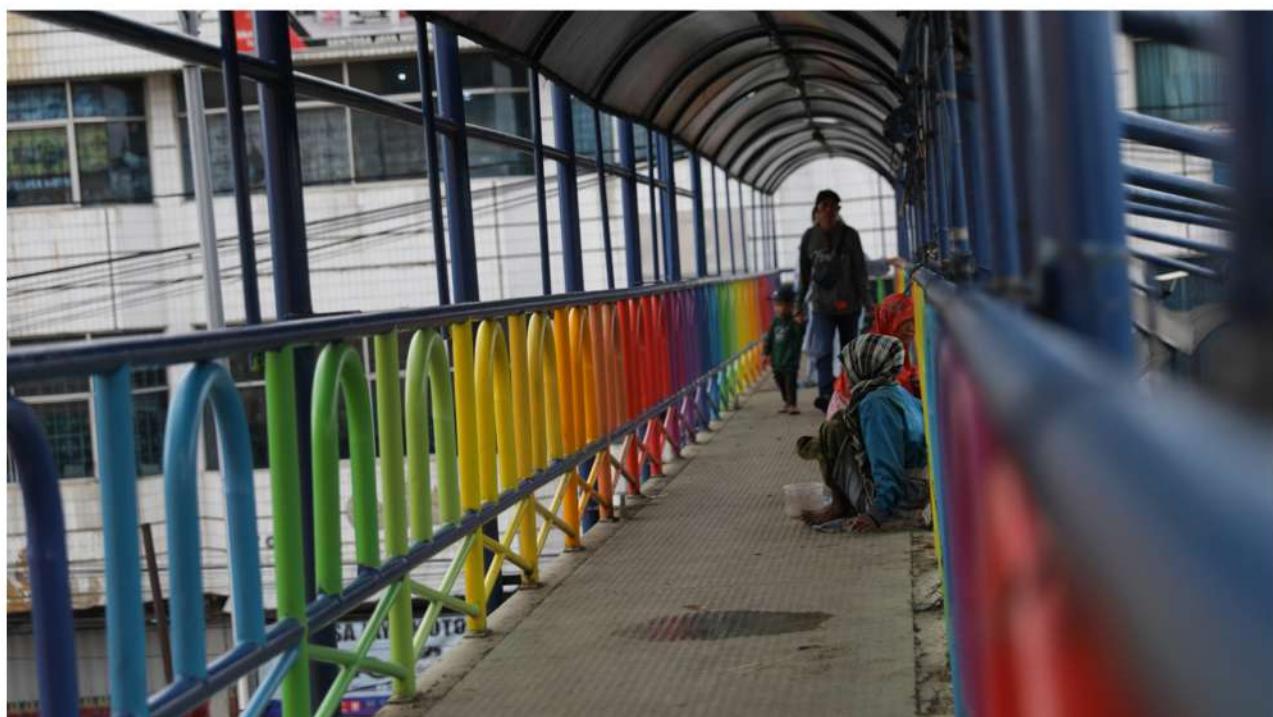
Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang berada pada tingkat kesejahteraan terendah dengan cara penyaluran bantuan sosial. Program ini diharapkan mampu meningkatkan persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan sosial. Selain itu, Selain itu, program ini juga memastikan pemenuhan hak dasar dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi, serta pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup.

### 2. Program Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui penguatan dan pengembangan kewirausahaan serta perluasan kesempatan kerja dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru atau meningkatkan lapangan pekerjaan yang sudah ada.

### 3. Program Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan

Program ini bertujuan untuk mengurangi daerah atau wilayah dengan persentase kemiskinan yang tinggi melalui pemenuhan pelayanan dasar termasuk pendidikan, kesehatan, sanitasi, penataan lingkungan dan rumah layak huni. Program ini juga akan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan.



Bandar Lampung merupakan sebuah kota yang sangat memberdayakan UMKM di wilayahnya, berdasarkan data terakhir terdapat sekitar 118.533 unit UMKM yang berperan penting dalam perekonomian dan penyediaan kebutuhan Kota Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung berperan sangat penting dalam mendukung perkembangan kewirausahaan di kota ini. Pada bulan Juni 2024, pemerintah Kota Bandar Lampung baru saja meresmikan UMKM Provinsi Lampung. Pasar UMKM ini diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan UMKM di Kota Bandar Lampung, fasilitas yang tersedia di pasar ini berupa area pelatihan bagi para pelaku UMKM serta showcase untuk produk UMKM.

Selain membangun pasar UMKM, pemerintah Kota Bandar Lampung kerap kali mengadakan event yang bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk UMKM lokal, salah satu event yang baru diresmikan pada bulan Juli adalah "Bandar Lampung Expo". Acara ini memperkenalkan beragam jenis UMKM baik berupa makanan dan beragam jenis minuman serta kerajinan lainnya.



Pemerintah Kota Bandar Lampung juga memberikan pinjaman tanpa bunga bagi para pelaku UMKM, program ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM dalam menambah modal usaha sehingga dapat berkembang semakin besar. Pemerintah kota berharap para pelaku UMKM tersebut dapat berpartisipasi mengurangi angka kemiskinan di Kota Bandar Lampung.

Digitalisasi, seperti pembayaran perbankan, dompet digital, dan internet banking, telah diterapkan oleh sebagian besar UMKM di Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung mendorong usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk memulai pemasaran digital untuk meningkatkan daya saing mereka dengan literasi digital. Pelaku UMKM sudah menggunakan platform pasar dan media sosial untuk pemasaran. Dipercaya bahwa pengembangan UMKM memiliki kemampuan untuk meningkatkan lapangan kerja, peluang usaha, dan pemulihhan ekonomi masyarakat, mengingat peran UMKM dalam meningkatkan perekonomian.

Kota Bandar Lampung memiliki tujuan menjadi kota kreatif dengan mengutamakan keunggulan dalam bidang seni, pakaian, dan kuliner. Diharapkan UMKM dapat mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan momentum kebangkitan pariwisata.





## Nilai dan Konten Pembangunan Kota Bandar Lampung Kehidupan Sehat dan Sejahtera

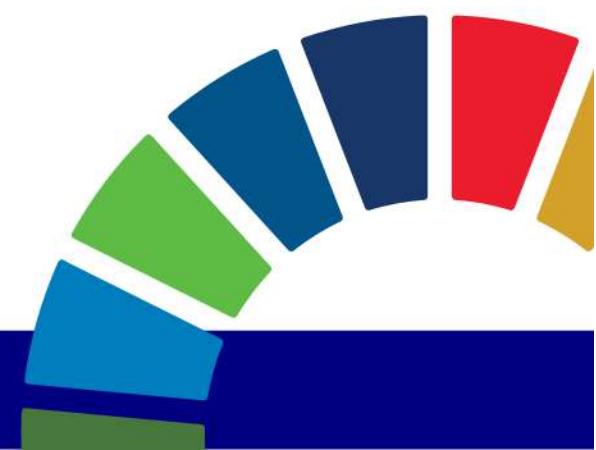
Pembangunan sektor kesehatan untuk SDGs sangat tergantung kepada peran aktif seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat dan daerah, parlemen, dunia usaha, media massa, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi profesi dan akademisi, mitra pembangunan serta Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir RPJMD Provinsi Lampung periode Tahun 2019-2024, sehingga target tujuan sasaran pembangunan jangka menengah harus diwujudkan sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan di RPJMD maupun di dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.



Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menetapkan Stunting sebagai Prioritas 2020 - 2024 dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 24,4% pada Tahun 2021 menjadi 14% pada tahun 2024. Kota Bandar Lampung selama kurun waktu Tahun 2021 - 2022 melakukan berbagai kegiatan guna percepatan penurunan Stunting. Pemerintah Kota Bandar Lampung melaksanakan kegiatan Acara Rembug Stunting tingkat kota Bandar lampung Tahun 2024 sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan amanat Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 4005.7/477/Bangda tanggal 23 Januari 2024 perihal Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.

Penanganan stunting harus menjadi prioritas utama. Dengan kerja sama dan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, saya yakin kita dapat menurunkan angka stunting di kota Bandar Lampung. Program Percepatan penurunan stunting ini termasuk dalam salah satu program prioritas pembangunan nasional, dimana dalam Rapat Terbatas Presiden RI, Bapak Joko Widodo tahun 2024 kembali menekankan agar setiap daerah mendukung pencapaian target prevalensi stunting tahun 2024 maksimal 14%. Pada kesempatan ini Pemerintah Kota Bandar lampung memberikan Apresiasi peran serta dalam Aksi Konvergensi upaya penurunan stunting tingkat kota Bandar Lampung. Dilanjutkan dengan Pembacaan Kesepakatan Rembug Stunting dan Penandatanganan Komitmen Bersama Percepatan Penurunan Stunting kota Bandar Lampung Tahun 2025. Serta Paparan Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting kota Bandar Lampung Tahun 2023 dan Rencana Tahun 2025.





## **Nilai dan Konten Pembangunan Kota Bandar Lampung Pendidikan Berkualitas dan Bermutu**

Pada tahun 2024 pemerintahan Kota Bandar Lampung akan menyalurkan 8 ribu beasiswa bagi siswa sma/smk serta mahasiswa. Program ini dilakukan karena pemerintah kota menyadari bahwa pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Bandar Lampung. Salah satu program beasiswa unggulan Kota Bandar Lampung adalah Beasiswa Bina Lingkungan (Biling). Program ini ditujukan bagi siswa sekolah menengah dan hingga kuliah untuk keluarga yang kurang mampu.

Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap program ini akan memberikan kesempatan kepada penduduk lokal untuk dapat mengikuti menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi, sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM Kota Bandar Lampung. Harapannya beasiswa ini akan membantu anak-anak yang ingin belajar mencapai cita-citanya, program beasiswa ini juga diharapkan dapat mengurangi angka anak putus sekolah.



## PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Pendidikan di Kota Bandar Lampung mencakup taman kanak-kanak, PAUD, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Selain itu, ada 46 perguruan tinggi di Bandar Lampung, yang terdiri dari 6 perguruan tinggi negeri dan 40 perguruan tinggi swasta. Ini termasuk 19 akademi, 16 sekolah tinggi, 1 institut, dan 5 universitas.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu (Sipandu) dan Sistem Informasi Layanan Jaringan Inovasi Sekolah (Silajis). Sipandu dan Silajis adalah inovasi dari Disdikbud Bandar Lampung yang bertujuan untuk menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memberikan layanan kepada masyarakat terkait dunia pendidikan secara profesional, transparan, efektif, dan efisien. Selain itu, tujuan dari inovasi ini untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Aplikasi Sipandu memudahkan masyarakat mengakses informasi tentang dunia pendidikan, termasuk layanan online untuk satuan pendidikan, guru, wali murid, dan masyarakat Bandar Lampung. Sementara itu, aplikasi Silajis memberi satuan pendidikan platform digital untuk menyampaikan inovasi mereka secara online dalam bentuk naskah dan video, yang dikoordinasikan oleh koordinator wilayah Disdikbud Bandar Lampung.

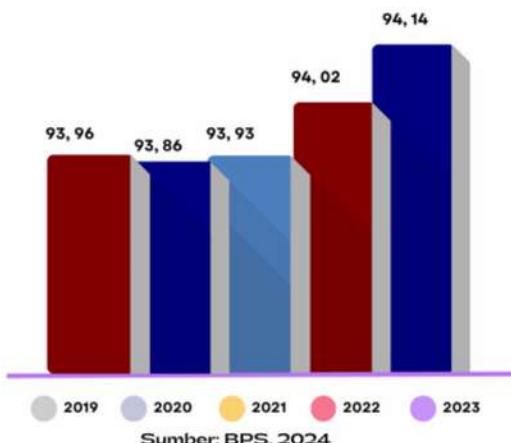


## Nilai dan Konten Pembangunan Kota Bandar Lampung Kesetaraan Gender

**Bandar Lampung (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung menyatakan segera membangun sekolah disabilitas guna memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan sejajar dengan anak normal. (Pemkot Bandarlampung: Sekolah disabilitas guna fasilitasi anak berkebutuhan khusus - ANTARA News Lampung).**

Pemerintah Kota Bandar Lampung menunjukkan perhatian yang nyata terhadap anak-anak berkebutuhan khusus dengan rencana pembangunan sekolah khusus di daerah Kedaton. Selain itu, Wali Kota Bandar Lampung akan menggratiskan seluruh fasilitas sekolah tersebut. Program bantuan untuk anak-anak berkebutuhan khusus akan menjadi prioritas dalam APBD murni, memastikan kesetaraan dalam pendidikan dan akses ke pelayanan kesehatan gratis di kota ini. Menurut Kepala Dinas PPPA Bandar Lampung, anak-anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama di muka umum dan dijamin akses mereka terhadap fasilitas kesehatan yang diperlukan.

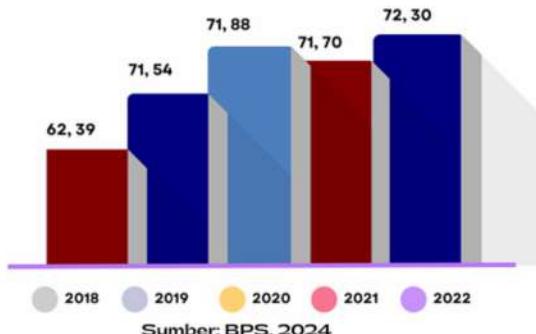
### Indeks Pembangunan Gender Tahun 2019-2023



Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indikator ini menunjukkan perempuan dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Data dibawah menunjukkan bahwa Indeks Pemberdayaan Gender Kota Bandar Lampung relatif mengalami peningkatan setiap tahun.

### Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2018-2022





## **Nilai dan Konten Pembangunan Kota Bandar Lampung Air Bersih dan Sanitasi Layak**

Pemerintah Kota Bandar Lampung berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan fokus pada sanitasi, terutama dalam pengelolaan air limbah domestik. Upaya ini termasuk penerbitan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Air Limbah Domestik dan Strategi Komunikasi untuk Mengubah Perilaku Menuju Sanitasi Aman. Dalam Perda ini, setiap perumahan diwajibkan untuk memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal, sebagai alternatif jika tidak memungkinkan untuk memiliki tangki septic pribadi, guna mengatasi masalah ruang.

Sejak tahun 2015, telah dipasang 70 IPAL dengan dukungan hibah dari Islamic Development Bank (IDB) dan Asian Development Bank (ADB). Kota Bandar Lampung memiliki satu IPLT besar di Kelurahan Bakung, yang berfungsi sebagai lokasi pembuangan limbah cair yang disedot dari masyarakat. Tingkat sanitasi di Kota Bandar Lampung kini mencapai 95 persen, sementara tingkat bebas BABS telah mencapai 92 persen.

Pemerintah Kota Bandar Lampung mengalokasikan dana penanganan inflasi dari swadaya masyarakat untuk pembangunan IPAL komunal di daerah yang belum bebas dari Buang Air Besar Sembarang (BABS). Dalam hal ini, ada dua daerah yang akan dibangun: Tanjung Karang Barat (TKB) dan Teluk Betung Timur (TBT). Anggaran pembuatan IPAL komunal mencapai Rp1 miliar untuk masing-masing daerah. Proyek ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.

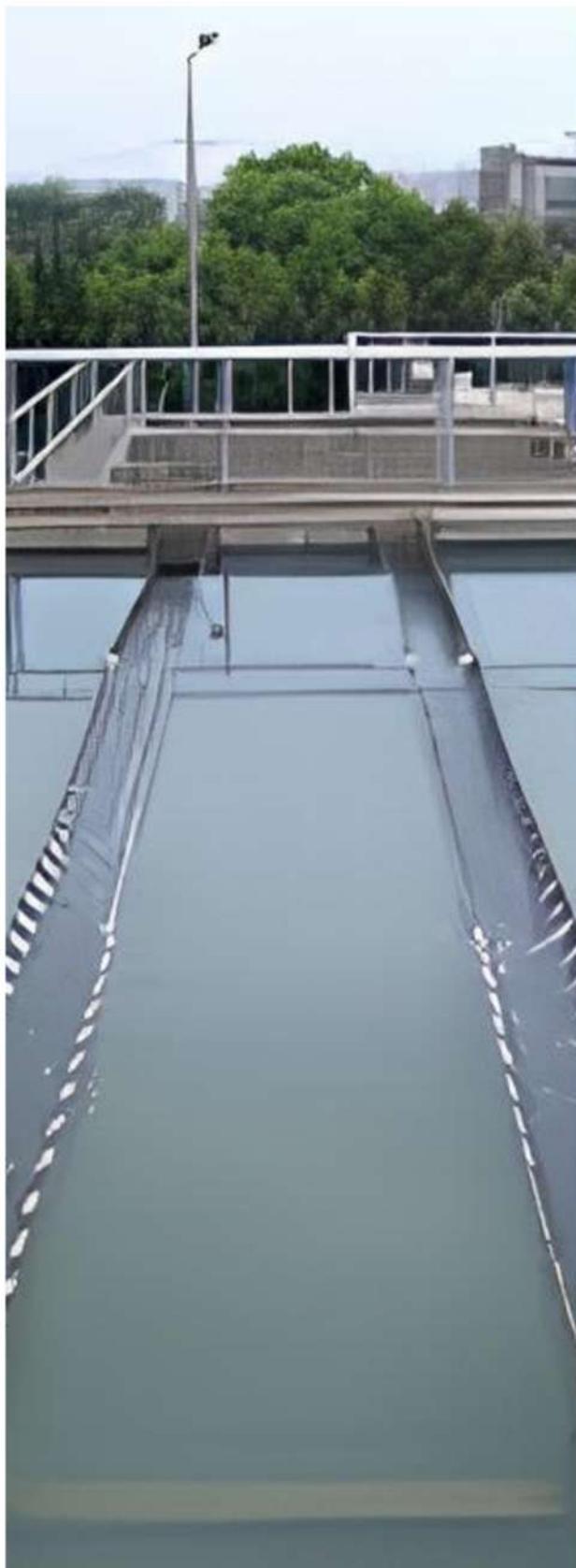


Pemerintah Kota Bandar Lampung bertindak sebagai pengawas dan pembina, sementara masyarakat menentukan upah pekerja dan daya belinya, sehingga dampak inflasi terhadap mereka dapat diminimalisasi. Saat ini, proses pembangunan IPAL komunal di RT.07 Lingkungan 1 Kelurahan Susunan Baru, Kecamatan Tanjung Karang Barat sudah mencapai 80 persen.

IPAL komunal dibangun dengan tujuan untuk memastikan lingkungan dan sanitasi yang sehat, serta mencegah pencemaran air bawah tanah akibat limbah rumah tangga seperti air cucian kamar mandi dan kotoran manusia. Dengan adanya IPAL komunal ini diharapkan dapat meningkatkan kebersihan dan kesehatan masyarakat Kota Bandar Lampung.

Banyaknya air bersih yang disalurkan oleh perusahaan air bersih ke seluruh pelanggan tahun 2021 tercatat sebanyak 26,03 juta m<sup>3</sup> atau mengalami peningkatan sekitar 8,86 juta m<sup>3</sup> (51,6 persen) jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebanyak 17,17 juta m<sup>3</sup>. Dari total volume air bersih yang disalurkan pada tahun 2021, lebih dari separuhnya (65,54 persen) disalurkan oleh perusahaan air bersih di Kota Bandar Lampung.

Apabila dilihat menurut kategori pelanggan, air bersih yang disalurkan terbanyak adalah untuk pelanggan rumah tangga yang mencapai 13,98 juta m<sup>3</sup> atau 53,73 persen. Jika dibandingkan dengan pelanggan rumahtangga yang berjumlah 78.989 rumahtangga, maka rata-rata air minum yang disalurkan perusahaan air bersih tahun 2021 mencapai 176,99 m<sup>3</sup> per pelanggan rumahtangga.





## BAB 4



# KESIMPULAN



## KESIMPULAN

Dokumen Voluntary Local Review (VLR) merupakan suatu alat berupa dokumen yang berfungsi untuk mendokumentasikan sekaligus mengkaji program yang telah dilakukan Kota Bandar Lampung dalam komitmen terhadap TPB/SDGs. Dari hasil dokumen ini, dapat disimpulkan bahwa tujuan-tujuan tersebut merupakan dasar untuk menentukan prioritas untuk mencapai SDGs di Kota Bandar Lampung. Untuk itu, penting sekali untuk menciptakan sinergitas antara target SDGs dengan program kerja yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah terkait agar memastikan tujuan-tujuan dari SDGs dapat terlaksana dengan baik. Untuk mencapai tujuan dari SDGs diperlukannya indikator dan data yang lengkap dan jelas, sehingga dapat memudahkan proses pengawasan dan evaluasi. Keberadaan program kerja dan perangkat daerah terkait menunjukkan kesiapan anggaran untuk memastikan pelaksanaan program-program yang bertujuan untuk mencapai SDGs di Kota Bandar Lampung.

Namun, beberapa target dan indikator pada sebagian tujuan masih belum teridentifikasi dengan baik, hal tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari perangkat daerah yang belum memenuhi tujuan tujuan tersebut. Faktor penyebab terjadinya hal tersebut dikarenakan kurangnya ketersediaan data yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut serta belum adanya sinergitas antara tujuan tersebut dengan program kerja yang dimiliki pemerintah daerah. Faktor lainnya yaitu, tujuan indikator yang ingin dicapai bukan tanggung jawab pemerintah daerah melainkan pemerintah pusat.



# SARAN

## SARAN

Dari kesimpulan diatas, dapat dirumuskan beberapa saran terkait dengan progres pencapaian TPB/SDGs di Kota Bandar Lampung. Dokumen Voluntary Local Review (VLR), yang mengacu pada data dan indikator dalam dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, diperlukan untuk mengukur langkah-langkah konkret yang telah atau akan dilakukan dalam komitmen Kota Bandar Lampung terhadap TPB/SDGs. Diperlukan alat berupa dokumen yang up-to-date dan efektif untuk mendokumentasikan sekaligus mengkaji progres pembangunan yang dicapai. Oleh karena itu, diperlukan kelengkapan data dari OPD, baik dalam format Matriks maupun dokumen perencanaan program dan kegiatan dari OPD dan lembaga terkait. Dengan begitu, dokumen VLR TPB/SDGs yang akan disusun kembali di tahun-tahun mendatang dapat menjadi lebih representatif dalam merekam progres TPB/SDGs di Kota Bandar Lampung.

Diketahui juga bahwa tidak semua tujuan dapat terpetakan keterkaitannya dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) OPD Kota Bandar Lampung pada dokumen VLR TPB/SDGs Kota Bandar Lampung tahun 2024 ini. Oleh karena itu, disarankan untuk meningkatkan keterkaitan target-target TPB/SDGs dengan tupoksi dan rencana kerja seluruh OPD di Kota Bandar Lampung. Selain itu, perlu adanya keseimbangan dalam prioritas dan alokasi pembiayaan untuk pencapaian TPB/SDGs, terutama untuk bidang-bidang non fisik.

